

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PMA, PMDN, dan Pengeluaran
Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik
Di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2018-2022)**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Rizqi Agung Laksono
Nomor Mahasiswa : 20313329
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2024

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah
Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata-1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Rizqi Agung Laksono
Nomor Mahasiswa : 20313329
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

Penulis,



Rizqi Agung Laksono

PENGESAHAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah
Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik
Di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2018-2022)

Nama : Rizqi Agung Laksono
Nomor Mahasiswa : 20313329
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Mohammad Bakti Hendrie Anto, S.E., M.Sc.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Disusun oleh : RIZQI AGUNG LAKSONO

Nomor Mahasiswa : 20313329

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 11 September 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Penguji : Listya Endang Artiani, SE.,M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Husein Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdir mu, akan mencari jalannya untuk menemukan mu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Allah SWT tidak membebani hambaNya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S. Al-Baqarah, 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah, 6)

“Teruslah berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima Allah SWT dan membawa kita masuk ke surga”

“Teruslah bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah SWT, bukankah ini yang kamu inginkan dahulu”

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah SWT itu sangat dekat” (Q.S. Al- Baqarah, 214)

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak perlu itu. Dan yang membenci mu tidak percaya itu” (Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah rabbil ‘alamin sebuah kata yang sangat pantas penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan kenikmatan, kesehatan, kemudahan, pertolongan, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dengan segala ketulusan dan penuh dengan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan semangat, pengorbanan, dan doa yang tak pernah terputus untuk penulis yang menjadi pilar utama dan kuat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk bapak dan ibu yang telah memberikan doa, motivasi, dan perhatian yang amat luar biasa untuk penulis, semua pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya kehadiran mereka.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak kandung ku dan kakak iparku. Yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan, dan bimbingan selama fase perkuliahan, terutama pada fase akhir perkuliahan yang tanpa henti memberikan dorongan dan berbagi ilmu serta pengalaman selama penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesahku selama perkuliahan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman Ilmu Ekonomi 2020 yang telah membantu selama fase awal perkuliahan hingga fase akhir perkuliahan saat ini, terima kasih sudah berkenan penulis repot kan untuk membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesuksesan dan keridhoan Allah SWT selalu membersamai kita.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PMA, PMDN, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022” yang disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi banyak pelajaran kehidupan serta yang selalu dinantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak yang memberikan doa dan semangat dari awal hingga penulisan skripsi ini selesai. Dalam hal ini, penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Bapak Mohammad Bakti Hendrie Anto, S.E.,M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, serta bimbingan serta bersedia meluangkan waktu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Listya Endang Artiani, SE.,M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec. Ph.D selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Kedua orang tua saya, Bapak Margito dan Ibu Sumartini yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan menguatkan penulis sehingga penulisan skripsi ini diberikan kemudahan dan kelancaran.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

6. Kakak kandung, kakak ipar, dan keponakan, Ratri Agung Nugraheni, Ekky Cahya Dhitia, Rafqa Cahya Rabbani yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga selalu penulis harapkan saran, kritik, dan masukan yang membangun untuk perbaikan karya penulis selanjutnya dari semua pihak. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Rizqi Agung Laksono

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
2.1. Kajian Pustaka	8
2.2. Landasan Teori.....	12
2.2.1 Teori Pengangguran	12
2.2.2 Pengangguran Terdidik.....	16
2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	18

2.2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)	20
2.2.5 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	22
2.2.6 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.....	25
2.3 Hubungan Antar Variabel	28
2.3.1 Hubungan Pengangguran Terdidik dengan Pertumbuhan Ekonomi	28
2.3.2 Hubungan Pengangguran Terdidik dengan Penanaman Modal Asing.....	28
2.3.3 Hubungan Pengangguran Terdidik dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	29
2.3.4 Hubungan Pengangguran Terdidik dengan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.....	30
2.3 Hipotesis Penelitian	31
2.4 Kerangka Penelitian.....	31
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis dan Model Pengumpulan Data	33
3.2 Definisi Variabel Operasional	33
3.3 Metode Analisis.....	35
3.3.1 Common Effects Model (CEM)	35
3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)	36
3.3.3 Random Effect Model (REM).....	36
3.4.1 Uji Chow Test (Uji F-statistik)	36
3.4.2 Uji Hausman	37
3.4.3 Uji Lagrange Multiplier	38
3.5 Pengujian Statistik.....	38
3.5.1 Koefisien Dererminasi (R ²)	38
3.5.2 Uji F (simultan)	39

3.5.3 Uji t.....	39
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Deskripsi Data Penelitian	41
4.2 Hasil Pengolahan Data.....	41
4.2.1 Regresi Fixed Effect Model	43
4.2.2 Regresi Common Effect Model	44
4.2.3. Regresi Random Effect Model	44
4.3 Pemilihan Model Regresi.....	45
4.3.1 Chow Test	46
4.3.2 Hausman Test.....	46
4.3.3 Lagrange Multiplier (LM) Test	47
4.4 Model Regresi Terbaik	48
4.4.1 Uji Koefisien Dererminasi (R^2)	48
4.4.2 Uji Simultan (Uji F)	49
4.4.3 Uji Parsial (Uji t)	49
4.5 Interpretasi Hasil.....	50
4.6 Intercept.....	51
4.7 Pembahasan.....	57
4.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik	58
4.7.2 Pengaruh PMA terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik	59
4.7.3 Pengaruh PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik	60
4.7.4 Pengaruh PPSP terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Terdidik	61
BAB V	62

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Implikasi.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Tingkat Pengangguran Terbuka	2
Gambar 1. 2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	3
Gambar 2. 1 Teori Klasik Pasar Tenaga Kerja	13
Gambar 2. 2 Akumulasi modal dan Pertumbuhan ekonomi	19
Gambar 2. 3 Kerangka Penelitian	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif	42
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Regresi Fixed Effect Model.....	43
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Common Effect Model	44
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Random Effect Model	45
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Chow Test.....	46
Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Hausman Test.....	47
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Lagrange Multiplier (LM) Test	47
Tabel 4. 8 Model Regresi Terbaik	48
Tabel 4. 9 Cross Section Fixed Effect Model	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I . Data Penelitian.....	68
Lampiran II . Hasil Estimasi CEM.....	71
Lampiran III. Hasil Estimasi FEM.....	72
Lampiran IV. Hasil Estimasi REM.....	73
Lampiran V. Uji Chow	74
Lampiran VI. Uji LM Test.....	75
Lampiran VII. Uji Hausman Test.....	76

ABSTRAK

Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan penerimaan dan realisasi investasi terbesar di Indonesia, didominasi oleh penanaman modal asing, dan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), menempati posisi kedua di Pulau Jawa. Akan tetapi, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat dalam 4 tahun terakhir masih tinggi diatas data secara nasional Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber resmi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Open Data Jawa Barat, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, dan Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan, dengan menerapkan regresi data panel untuk mengevaluasi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat pengangguran terdidik. Hasil temuan penelitian berdasarkan model terbaik FEM (*fixed effect models*) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik. Sebaliknya, Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

Kata Kunci: Pengangguran Terdidik, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.

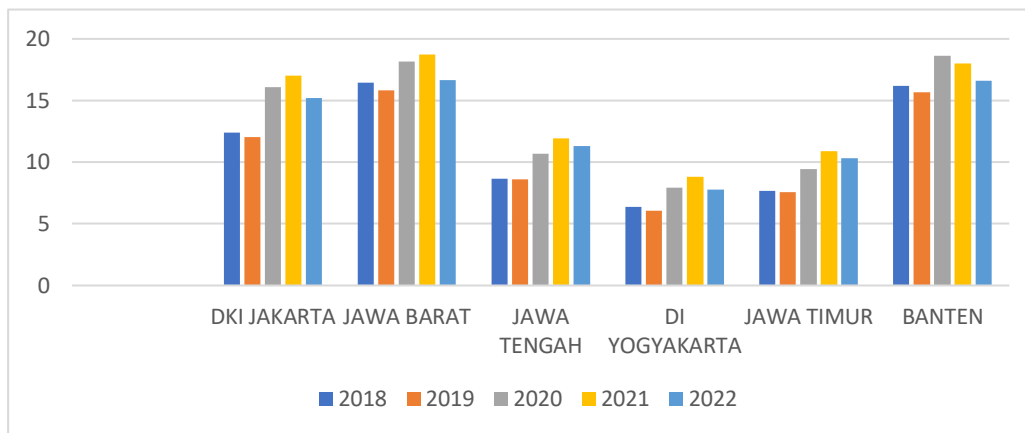
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, sehingga pendapatan perkapita suatu negara meningkat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Pada masa kini dimana kemajuan zaman dan teknologi yang semakin maju, terdapat banyak pengangguran yang tidak hanya dialami oleh masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan rendah, namun masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi juga menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga masih menganggur. Pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan secara aktif (Nanga, 2001). Penduduk usia kerja yang usianya 15 tahun atau lebih yang menganggur, bekerja atau sementara tidak bekerja dianggap sebagai pengangguran terbuka (BPS Indonesia, 2022). Rendahnya penyerapan tenaga kerja, rendahnya kesempatan kerja, serta terjadinya PHK di berbagai sektor perekonomian merupakan penyebab pengangguran terbuka tinggi. Kelompok pengangguran terbuka harus segera diatasi karena kelompok ini paling rentan terhadap berbagai macam permasalahan sosial (Hamid, 2018:7.29)

Pulau Jawa termasuk pulau yang memiliki nilai TPT tertinggi di Indonesia, dan jika dilihat data dari SIMREG Bappenas (2023) yang menunjukkan bahwa angka TPT Pulau Jawa memiliki nilai sebesar 35,19% lebih tinggi dari angka TPT secara nasional yaitu sebesar 5,32%. Menurut data dari SIMREG Bappenas (2023) Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 4 tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka masih tinggi diatas data secara nasional



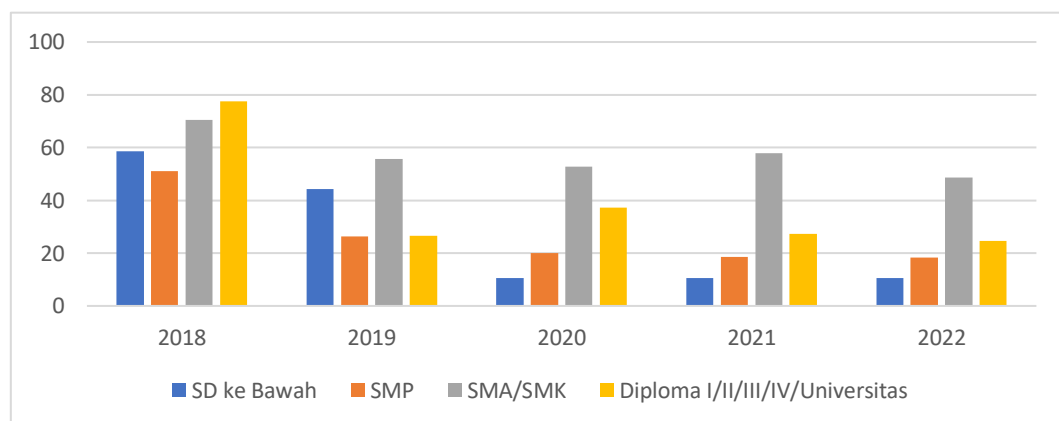
Gambar 1. 1 Data Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Persen)

Sumber : BPS, Sakernas (Diolah)

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka periode 2018-2022 di masing-masing provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di setiap provinsi terjadi pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan nilai sebesar 18,74%, Provinsi Banten menempati posisi kedua dengan nilai sebesar 17,99%, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi ketiga dengan nilai sebesar 17,01%, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi keempat dengan nilai sebesar 11,91%, Provinsi Jawa Timur menempati posisi kelima dengan nilai sebesar 10,91%, dan Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi keenam dengan nilai terendah yaitu sebesar 8,84%.

Masalah pengangguran seringkali dikaitkan dengan tingkat pendidikan seseorang. Ketika semakin tinggi pendidikan seseorang, maka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai semakin besar. Hal ini menunjukkan jika mutu dari sumber daya manusia yang semakin tinggi maka penyerapan akan tenaga kerja juga mengalami peningkatan sehingga mengurangi pengangguran. Sektor pendidikan merupakan sarana yang tepat dan strategis dalam membina serta mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bermutu tinggi sebagai bentuk pembangunan dan pembentukan masa depan suatu negara. Dengan dasar pendidikan yang dimiliki tersebut maka diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam mendapatkan kesempatan kerja yang sama agar mampu menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Tenaga kerja yang dihasilkan

memiliki spesifikasi dan keterampilan yang sesuai dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja maka dapat dikatakan sistem pendidikan yang tersedia di suatu wilayah semakin efisien. Namun, ketika sumber daya manusia efisien maka dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. (Rahmawati & Hadiwiyono, 2004). Akan tetapi ketika perencanaan pembangunan dari lembaga pendidikan kurang selaras dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja maka dapat menimbulkan pengangguran terdidik (Suryana, 2000).



Gambar 1. 2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Sumber : BPS, Sakernas (Diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2 pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 hampir di setiap tahunnya mengalami perubahan secara fluktuatif yang didominasi oleh lulusan SMA, SMK, Diploma, dan Universitas. Pada tahun 2018 lulusan jenjang SMA atau SMK mencapai angka tertinggi sebesar 70,39% sedangkan lulusan Diploma atau Universitas mencapai angka tertinggi 77,48%. Pada tahun 2019 seluruh lulusan jenjang SMA, SMK, Diploma, dan Universitas mengalami penurunan yang signifikan, jenjang SMA atau SMK yaitu sebesar 55,74%, dan pada jenjang Diploma atau Universitas mencapai 26,52%. Pada tahun 2020 jenjang Pendidikan SMA dan SMK kembali mengalami penurunan walaupun tidak signifikan yaitu sebesar 52,74%, sedangkan jenjang Diploma dan Universitas mengalami peningkatan sebesar 37,27%. Pada tahun 2021 lulusan SMA dan SMK mengalami fluktuasi yang meningkat sebesar 57,91%, sedangkan lulusan Diploma dan Universitas mengalami penurunan yang signifikan sebesar 27,26%. Pada tahun 2022 jenjang SMA dan SMK mengalami penurunan mencapai angka sebesar 48,74%, dan diikuti pada

jenjang Diploma dan Universitas yang mencapai angka sebesar 24,69%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya lulusan dari jenjang SMA, SMK, Diploma, dan Universitas menjadi salah satu faktor penyebab tingginya pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Barat.

Menurut (Mankiw, 2003), pengangguran terdidik adalah individu yang sedang mencari pekerjaan atau tidak bekerja, tetapi memiliki pendidikan minimal SMA. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan mendefinisikan pengangguran terdidik sebagai orang yang belum bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau telah mendaftar untuk bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, dengan tingkat pendidikan SMA atau lebih tinggi. Pengangguran terdidik menggambarkan situasi dimana tenaga kerja yang berpendidikan mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan, bukan karena kurangnya perusahaan yang mau menerima mereka, tetapi karena mereka lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Penelitian oleh (Purwaka, 2012) menunjukkan bahwa pengangguran terbuka di kalangan orang terdidik dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan mengurangi produktivitas. Selain itu, meningkatnya tingkat pengangguran dapat memengaruhi kondisi sosial dan politik secara signifikan, seperti meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan terhadap stabilitas politik suatu negara.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat karena menurut data dari DPMPSTSP di provinsi tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadi daerah dengan penerimaan dan realisasi investasi terbesar di Indonesia, investasi terbesar diperoleh pada tahun 2023 dengan nilai investasi sebesar 210,6 triliun rupiah yang didominasi oleh penanaman modal asing sebesar 122,4 triliun dan penanaman modal dalam negeri sebesar 95,2 triliun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,5 persen (yoy) dan menempati posisi kedua dibanding dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa. Menurut BPS pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh produksi lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,67%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga mengalami pertumbuhan 19,35%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 43,36%. Dari sisi produksi, lapangan usaha

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,74%. Padahal dengan banyaknya investasi dan pertumbuhan ekonomi yang besar diharapkan muncul perusahaan atau sektor baru yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan output produksi sehingga banyak tenaga kerja terserap di pasar tenaga kerja, akan tetapi hal ini tidak selaras dengan masih banyaknya pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Barat.

Dari penjelasan di atas, maka diperlukan adanya studi untuk menjelaskan fenomena pengangguran terdidik yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Maka dalam penelitian ini mengambil judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh PMA terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?

2. Untuk menganalisis pengaruh PMA terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
3. Untuk menganalisis pengaruh PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?
4. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara perkembangan ekonomi suatu wilayah dan penyerapan tenaga kerja terdidik. Melalui penelitian ini untuk memberikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja terdidik agar pengangguran dikalangan lulusan pendidikan tinggi menurun, serta membantu sektor swasta dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang tersedia.
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 bermanfaat untuk memberikan wawasan pengetahuan mengenai bagaimana aliran investasi asing dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Selain itu, melalui penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih efektif untuk menarik investasi asing yang berfokus pada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja lokal terampil, penelitian ini juga berguna bagi investor dan sektor swasta dalam memahami dampak investasi terhadap pasar tenaga kerja lokal, serta membantu institusi pendidikan dalam menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri yang didorong oleh investasi asing.
3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 bermanfaat untuk memberikan gambaran dan

pengetahuan bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang mendukung investasi dalam negeri di sektor-sektor strategis yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal. Selain itu, melalui penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku usaha domestik dalam merencanakan pengembangan bisnis yang selaras dengan kebutuhan tenaga kerja terdidik, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat nasional.

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan keterampilan lulusan yang siap bersaing di pasar kerja. Penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengembangan pendidikan yang lebih terarah untuk mengurangi pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu institusi pendidikan dalam menyesuaikan program dan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan industri, sehingga dapat menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian-penelitian sebelumnya tentang Pengangguran Terdidik yang menjadi acuan. Kesamaan variabel dependen dan independen, tujuan penelitian, teknik analisis, dan termuan penelitian yang akan digunakan sebagai referensi penelitian sebelumnya menjadi pertimbangan dalam memilih penelitian terdahulu. Refrensi penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Penelitian oleh Indah (2017) bertujuan untuk menganalisis dampak variabel-variabel seperti jumlah penduduk, inflasi, upah minimum kabupaten, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah pondok pesantren terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2011-2015. Penelitian ini memanfaatkan regresi data panel dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran, sedangkan jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah pondok pesantren tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota Jawa Tengah pada periode tersebut.

Penelitian Febriana (2017) penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang analisis pengaruh variabel-variabel produk domestik regional bruto, upah minimum kabupaten/kota, dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap jumlah pengangguran terdidik di D.I Yogyakarta tahun 2010-2015. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel, yang datanya bersumber dari Badan Pusat Ststistik dari lima kabupaten/kota di daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan positif, pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan negatif, sedangkan produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di D.I Yogyakarta tahun 2010-2015

Penelitian oleh Nila (2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel seperti upah minimum provinsi, penanaman modal asing, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di kalangan lulusan universitas di Pulau Jawa selama tahun 2008-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Sistem Informasi dan Manajemen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengangguran lulusan universitas, sementara penanaman modal asing dan jumlah penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di kalangan lulusan universitas di Pulau Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifai pada tahun 2018 bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel seperti investasi asing, investasi domestik, persentase lulusan SMA/SMK, dan UMK terhadap tingkat pengangguran terdidik di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2011-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi domestik, persentase kelulusan SMA/SMK, dan UMK mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan investasi asing tidak berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di wilayah tersebut.

Penelitian Vena (2019) penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang analisis pengaruh variabel-variabel upah minimum provinsi, penanaman modal asing, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik lulusan universitas di Pulau Jawa tahun 2008-2017. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel, yang datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bappenas dari masing-masing provinsi yang berada di Pulau Jawa. Hasil empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap jumlah pengangguran terdidik,

sedangkan variabel penanaman modal asing dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengangguran terdidik lulusan universitas di Pulau Jawa tahun 2008-2017.

Penelitian Leni (2021) penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang analisis pengaruh variabel-variabel tingkat pendidikan, upah minimum regional, dan penanaman modal dalam negeri terhadap determinan pengangguran terdidik lulusan perguruan tinggi di Pulau Jawa tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang sumber datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersamaan semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik, dan variabel upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terdidik.

Penelitian Farid (2022) penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang analisis variabel-variabel inflasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan investasi terhadap pengangguran terdidik lulusan universitas di Indonesia tahun 2005-2021. Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*), yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik, PSWI, dan Bank Indonesia. Hasil empiris penelitian ini menggambarkan bahwa variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas di Indonesia, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas di Indonesia tahun 2005-2021.

Penelitian Habibah (2024) penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021. Menggunakan variabel Pertumbuhan ekonomi, UMK, IPM, dan Jumlah penduduk. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Portal data Jawa Tengah, serta menggunakan model regresi data panel. Hasil temuan penelitian ini yaitu berdasarkan model regresi terbaik FEM (*Fixed effect model*) yang menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi, UMK, dan Jumlah penduduk memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik, sedangkan IPM menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Tujuan	Hasil
1.	Indah Subekti	2017	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2015	Upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi (berpengaruh) Jumlah penduduk, inflasi, jumlah pondok pesantren (tidak berpengaruh)
2.	Febriana Nur Rahmawati	2017	Analisis Pengaruh PDRB, UMK, Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta	Upah minimum berpengaruh (+) Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh (-) PDRB tidak berpengaruh (+)
3.	Nila Ayu Islamia	2017	Analisis Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa Tahun 2008-2016	Upah minimum berpengaruh (-) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh (-) PMA dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh
4.	Ahmad Rifai	2018	Analisis Pengaruh PMA, PMDN, Persentase kelulusan SMA/SMK terhadap Pengangguran Terdidik Kab/Kota di DIY 2011-2016	PMDN, Persentase kelulusan SMA/SMK, UMK berpengaruh PMA tidak berpengaruh
5.	Vena Ayu Septiana	2019	Determinan Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa Tahun 2008-2017	Upah minimum, Pertumbuhan ekonomi berpengaruh PMA, Jumlah penduduk tidak berpengaruh
6.	Leni Anjarwati, Whinarko Juliprijanto	2021	Determinan Pengangguran Terdidik Lulusan Perguruan Tinggi di Pulau Jawa Tahun 2015-2019	Tingkat pendidikan, PMDN, berpengaruh (+) Upah minimum berpengaruh (-)
7.	Farid Wahyu Aji Pratama, Setyowati Eni	2022	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Indonesia 2005-2021	Inflasi, Pertumbuhan penduduk berpengaruh Pertumbuhan ekonomi, Investasi tidak berpengaruh
8.	Habibah Vera Shantyawati	2024	Determinan Pengangguran Terdidik Di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021	Pertumbuhan ekonomi, UMK, Jumlah penduduk tidak berpengaruh (+) Indeks pembangunan manusia berpengaruh (-)

Kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian ini membahas terkait pengangguran terdidik yang terdapat di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2022. Pengangguran terdidik yang dimaksud adalah jumlah angkatan kerja yang menjadi lulusan jenjang SMA/SMK sederajat hingga perguruan tinggi yang masih belum bekerja, mencari kerja, dan tidak mencari kerja yang dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan dalam penelitian menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP)

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Pengangguran

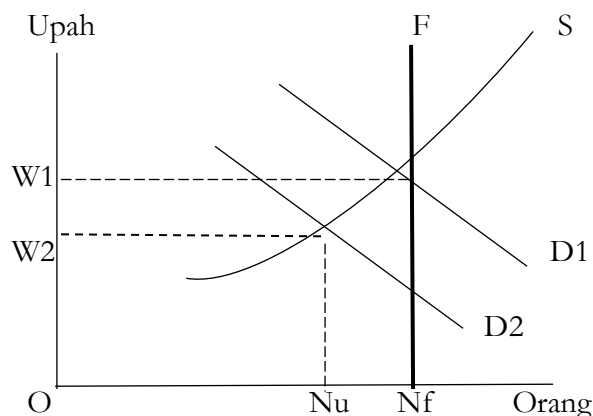
Pengangguran merujuk pada individu atau kelompok dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan (Feriyanto, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Dalam Teori Klasik, pengangguran bersifat sukarela. Aliran klasik, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo, menyatakan bahwa pasar tenaga kerja akan mencapai keseimbangan secara alami di bawah hukum permintaan dan penawaran. Menurut mereka, pengangguran terjadi karena pekerja

menolak menerima upah yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengangguran dalam pandangan klasik hanya bersifat sementara dan akan hilang jika upah turun ke tingkat yang sesuai dengan produktivitas pekerja. Namun, teori ini dianggap tidak relevan ketika tingkat pengangguran tinggi atau terjadi resesi ekonomi, karena tidak mempertimbangkan faktor lain seperti ketidakseimbangan struktural atau kebijakan pemerintah. Teori Klasik menjelaskan ketika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun, Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil.

Menurut teori klasik, bila harga dari tenaga kerja (upah) juga cukup fleksibel maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran akan tenaga kerja. Bahwa tidak ada kemungkinan timbulnya *pengangguran suka rela*, artinya pada tingkat upah (riil) yang berlaku di pasar tenaga kerja semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Mereka yang menganggur, hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku (penganggur yang *sukarela*). Proses permintaan dan penawaran tenaga kerja pada pasar tenaga kerja

Gambar 2. 1 Teori Klasik Pasar Tenaga Kerja



Sumbu vertikal menunjukkan tingkat upah riil, sumbu horizontal menunjukkan jumlah orang yang bekerja di dalam masyarakat. D_1 adalah kurva permintaan akan

tenaga kerja. S adalah kurva penawaran tenaga kerja yang menunjukkan jumlah yang bersedia bekerja pada berbagai tingkat upah riil. F menunjukkan jumlah angkatan kerja, yaitu semua orang yang mampu dan bersedia bekerja. Pada posisi ini perekonomian berada pada *full employment*, di mana seluruh angkatan kerja yang bersedia bekerja dapat bekerja. Jika pada kondisi tertentu produsen mengurangi produksinya, maka kurva permintaan akan tenaga kerja akan bergeser ke kiri menjadi D_2 . Tingkat upah yang berlaku turun dari w_1 ke w_2 , dan jumlah orang yang bekerja turun dari N_F ke N_U . N_F dikurangi N_U adalah jumlah orang yang tidak bekerja, dan mereka menganggur secara sukarela karena tidak mau bekerja pada tingkat upah yang baru (w_2). Bila harga-harga barang sudah saling menyesuaikan maka semua barang akan terjual dan tingkat produksi menjadi “normal” kembali, sehingga D_2 bergeser kembali ke D_1 . Akibatnya posisi *full employment* tercapai kembali, dan sekali lagi semua yang ada di angkatan kerja bias bekerja, pada tingkat upah riil lama (w_1).

Menurut Badan Pusat Statistik, Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000). Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan:

a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*)

Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)

1) Bekerja penuh (employed) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

2) Setengah menganggur (underemployed) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

Terdapat beberapa jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya yang dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 1994)

1) Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

2) Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

3) Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

2.2.2 Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik digolongkan dalam pengangguran struktural, hal ini disebabkan akibat ketidaksesuaian antar struktur angkatan kerja berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri atau lokasi geografis dan struktur permintaan akan tenaga kerja (Lipsey, 1997). Pengangguran sendiri tidak hanya dialami oleh angkatan kerja yang memiliki pendidikan rendah, namun pengangguran saat ini juga dialami oleh angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas yaitu lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi.

Menurut teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Gary S. Becker dan Theodore Schultz, yang menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan sebagai bentuk pengembangan modal manusia. Menurut teori ini, pendidikan dianggap sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktivitas individu dan pada gilirannya, meningkatkan pendapatan dan peluang kerja. Namun, ketika pengangguran terdidik terjadi, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendidikan yang dimiliki dan kebutuhan pasar. Dalam konteks teori modal manusia pengangguran terdidik terjadi karena adanya mismatch keterampilan antara pendidikan yang diperoleh dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, selain itu kegagalan sistem pendidikan yang tidak mampu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

Hal tersebut mencerminkan kemerosotan produktifitas sumber daya manusia dan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya manusia. Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja, hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran terdidik. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, perlu tambahan keterampilan di luar bidang akademik. Disisi lain, para pengangguran terdidik mempunyai tingkat aspirasi yang tinggi seperti lebih memilih pekerjaan yang mendapatkan banyak fasilitas, mendapatkan kedudukan, dan langsung mendapatkan gaji besar. Pengangguran terdidik adalah seseorang yang telah lulus pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Para pengangguran terdidik biasanya dari kelompok masyarakat menengah keatas yang memungkinkan adanya jaminan kelangsungan hidup meski menganggur. Menurut Badan Pusat Statistik bahwa “Tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerjayang berpendidikan SLTA, Sarjana Muda, atau Sarjana (sebagai kelompok terdidik) yang tidak bekerja.” Pengangguran tenaga kerja terdidik adalah salah satu masalah makro ekonomi, adapun faktor-faktor penyebab tenagakerja terdidik dapat dikatakan hampir sama di setiap negara, yaitu krisis ekonomi, struktur lapangan kerja yang tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenagakerja terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang, dan jumlahangkatan kerja yang lebih besar jika dibandingkan dengan kesempatan kerja.”

Menurut Rahmawati dan Hadiwiyono dalam Astuti (2014) bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik adalah :

- a. Adanya penawaran tenaga kerja yang melebihi dari permintaan,
- b. Kebijakan rekrutmen tenaga kerja sering tertutup,
- c. Perguruan tinggi sebagai proses untuk menyiapkan lulusan atau tenaga kerja yang siap pakai belum berfungsi sebagaimana mestinya,
- d. Adanya perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan struktur industri.

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional secara agregat dalam kurun waktu tertentu. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian pada tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun lainnya (Sukirno, 2006)

Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan sebagai indikator untuk menilai kinerja ekonomi suatu wilayah. Pada tingkat nasional konsep pertumbuhan ekonomi yaitu PDB (produk domestik bruto), sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota menggunakan konsep PDRB (produk domestik regional bruto). Pertumbuhan ini dapat diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. PDRB mencerminkan total output yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah. PDRB dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari setiap sektor serta keseluruhan sektor (BPS, 2008). Oleh karena itu, dengan meningkatnya output yang dihasilkan oleh perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung, pertumbuhan PDRB akan menciptakan peluang kerja.

Kemajuan ekonomi di suatu wilayah mencerminkan kesuksesan pembangunan, meskipun bukan merupakan indikator utama dari keberhasilan pembangunan itu sendiri (Todaro & Smith, 2006). Teori pertumbuhan ekonomi membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan output dalam jangka panjang serta bagaimana

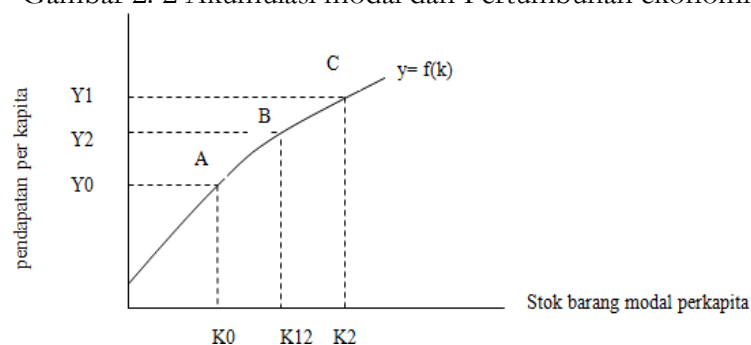
interaksi antar faktor tersebut dapat menghasilkan pertumbuhan (Boediono, 1982). Pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi guna mencapai peningkatan output, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam wilayah tertentu (Adisasmita, 2013). Secara umum, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga infrastruktur yang tersedia menjadi lebih banyak, jumlah perusahaan dan lapangan pekerjaan bertambah dan berkembang, tingkat pendidikan meningkat, serta teknologi mengalami pengembangan dan kemajuan (Sukirno, 2013). Sebagai dampak dari perkembangan ini, diharapkan akan tercipta lebih banyak peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Teori pertumbuhan Neo-Klasik pada dasarnya bertujuan untuk menerangkan faktor-faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan sumbangan relatif dari berbagai faktor ini dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Neo-Klasik ditunjukkan bagaimana tiga jenis input, yaitu modal, teknologi dan tenaga kerja menentukan tingkat kegiatan ekonomi, serta peranan dari modal dan perkembangan teknologi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2011).

Apabila diasumsikan suatu proses pertumbuhan dan teknologi tidak berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai dan pertambahannya dari suatu periode ke periode lainnya bergantung kepada dua faktor, yaitu stok modal yang tersedia dan jumlah tenaga kerja.

Gambar 2. 2 Akumulasi modal dan Pertumbuhan ekonomi



Kurva $y=f(k)$ menggambarkan ciri hubungan diantara tingkat pertumbuhan ekonomi (yang dinyatakan sebagai tingkat pendapatan per kapita) dengan tingkat stok modal yang tersedia. Kurva $y=f(k)$ menggambarkan bahwa terdapat hubungan positif diantara pertumbuhan ekonomi dengan nilai stok modal perkapita. Semakin besar nilai stok modal per kapita semakin tinggi pendapatan perkapita atau tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dapat dilihat dari titik A yang menunjukkan apabila stok modal per kapita adalah k_0 tingkat pendapatan perkapita adalah y_0 dan apabila stok modal per kapita meningkat menjadi k_1 pendapatan perkapita akan meningkat menjadi y_1 . Gambaran ini berarti bahwa semakin tinggi stok barang modal dalam suatu Negara semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)

Untuk mendorong perekonomian di tingkat negara maupun daerah, diperlukan investasi asing. Menurut (Sukirno, 2013), investasi merujuk pada pengeluaran modal suatu perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi guna meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Dengan adanya investasi tersebut, produktivitas akan mengalami peningkatan.

Menurut (Irawan & Suparmoko, 1992), investasi asing adalah investasi yang dilakukan oleh pemodal asing di negara kita dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan. Penambahan modal asing akan terjadi jika negara kita mengalami kemajuan signifikan dalam perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, definisi penanaman modal dalam undang-undang ini hanya mencakup investasi asing secara langsung yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Dalam hal ini, pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari investasi tersebut.

Menurut (Jhingan, 2013), terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan masuknya investasi asing ke suatu negara, baik dalam bentuk modal swasta maupun modal negara. Bentuk modal asing antara lain yaitu:

1. Investasi tidak langsung sebagian besar terdiri dari kepemilikan saham yang dapat dipindahkan (dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara penerima modal), serta kepemilikan saham atau surat utang oleh warga negara dari berbagai negara lainnya. Kepemilikan saham ini tidak memberikan hak untuk mengendalikan perusahaan; para pemegang saham hanya memiliki hak atas dividen. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi tidak langsung secara multilateral telah mengalami pertumbuhan pesat. Contohnya, warga negara dari suatu negara membeli obligasi dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu di negara-negara berkembang.

Terdapat beberapa teori dalam penanaman modal asing (PMA) yang dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Muchamad Ardiansyah dalam orasi ilmiahnya "Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal", mengemukakan bahwa berbagai teori yang terkait dengan kepentingan negara dalam investasi, dengan fokus pada perspektif pembangunan ekonomi. Teori ekonomi pembangunan ini menjadi dasar bagi kebijakan hukum investasi, yaitu :

Teori Klasik dan Neo Klasik (*The Classical and Neo Classical Theory on Foreign Investment*)

Teori ekonomi klasik dan neo-klasik berpendapat bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan memberikan manfaat bagi perekonomian negara penerima. Salah satu pandangan utama dari teori neo-klasik adalah bahwa penanaman modal asing, terutama di negara berkembang, berperan sebagai pembimbing. Investasi asing menggantikan fungsi produksi yang kurang efisien di negara industri dengan mentransfer teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran, informasi pasar, pengalaman organisasi, penemuan produk baru, teknik produksi, serta pelatihan pekerja. Perusahaan multinasional dianggap sebagai agen utama dalam transfer teknologi dan pengetahuan.

Hubungan antara investasi dan pengangguran dapat dilihat melalui teori pertumbuhan Harrod-Domar. Dalam teori ini, Harrod-Domar berpendapat bahwa investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K), yang diwakili oleh delta

K ($I = \Delta K$), karena stok modal (K) memiliki hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional (Sukirno, 2004). Artinya, investasi akan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah stok modal, yang berarti investasi berpengaruh dari sisi penawaran. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Tingkat investasi memengaruhi tingkat pengangguran, di mana semakin tinggi investasi, semakin besar peluang untuk membuka lapangan kerja baru. Peningkatan lapangan kerja ini akan mengurangi pengangguran. Investasi memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya investasi, persediaan barang modal bertambah, yang akan meningkatkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang lebih tinggi membutuhkan tenaga kerja tambahan. Investasi merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan produksi di negara berkembang, dan dengan demikian, berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Menurut Teori Klasik dan Neo-Klasik, investasi asing langsung berperan penting dalam menurunkan pengangguran dengan meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan keterampilan tenaga kerja. FDI membawa modal, teknologi, dan manajemen yang lebih maju, yang secara teoritis seharusnya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Namun, efek FDI terhadap pengangguran dapat bervariasi, tergantung pada struktur pasar tenaga kerja, kebijakan ekonomi, dan sektor-sektor yang mendapat investasi.

2.2.5 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Teori investasi menurut John Maynard Keynes dalam karyanya *"The General Theory of Employment, Interest, and Money"* (1936), investasi adalah salah satu determinan utama dari tingkat output dan pengangguran dalam perekonomian. Dalam teori Keynesian, investasi merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat (total pengeluaran dalam perekonomian). Permintaan agregat terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor. Ketika investasi meningkat, permintaan agregat juga meningkat, yang kemudian mendorong peningkatan produksi dan pendapatan.

Teori Keynesian menjelaskan bahwa investasi dalam negeri berpengaruh terhadap pengangguran dengan cara penciptaan lapangan kerja. Ketika pemerintah atau sektor swasta melakukan investasi dalam proyek-proyek baru, hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru. Seperti pembangunan infrastruktur, pabrik, atau sektor layanan baru dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu investasi dalam negeri memiliki dampak berganda (*multiplier effect*). Investasi tidak hanya menciptakan lapangan kerja secara langsung, tetapi juga dapat memiliki efek berganda. Ketika pekerja baru dipekerjakan, mereka akan mengeluarkan uang untuk barang dan jasa, yang akan meningkatkan permintaan agregat lebih lanjut. Ini akan mendorong perusahaan lain untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran lebih lanjut. Dengan peningkatan keterampilan yang merupakan investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga merupakan bagian dari investasi dalam negeri. Dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, individu menjadi lebih siap untuk memasuki pasar kerja, yang membantu menurunkan pengangguran.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 1, modal dalam negeri didefinisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penanaman modal dalam negeri, menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2007, adalah kegiatan investasi untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan investasi untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia, dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Manfaat dari Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Menghemat devisa negara.
2. Mengurangi ketergantungan pada produk asing.
3. Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan hulu-hilir.

4. Berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Potensi dan karakteristik suatu daerah.
2. Budaya masyarakat setempat.
3. Pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional.
4. Peta politik di tingkat daerah dan nasional.
5. Kecermatan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang mendukung iklim bisnis dan investasi.

Syarat-syarat Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. **Permodalan:** Modal harus berasal dari kekayaan masyarakat Indonesia (Ps 1:1 UU No.6/1968), baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. **Pelaku Investasi:** Negara dan pihak swasta, dengan swasta terdiri dari individu dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. **Bidang Usaha:** Semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori, atau dirintis oleh pemerintah.
4. **Perizinan dan Perpajakan:** Memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dll.
5. **Batas Waktu Berusaha:** Mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah.
6. **Tenaga Kerja:** Wajib menggunakan tenaga ahli dari Indonesia, kecuali untuk jabatan tertentu yang belum bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Harus mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak karyawan).

Menurut (Mankiw, 2007) Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah suatu bentuk penanaman modal yang bersumber dari dana swasta domestik ataupun pemerintah yang ditujukan untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha atau dalam

pengadaan alat dan perlengkapan produksi. Bagi negara sedang berkembang, PMDN ini merupakan salah satu sumber pembiayaan terpenting. PMDN memiliki andil yang cukup besar dalam proses pembangunan negara. Seperti yang diungkapkan (Dyah & Suratma, 2009) bahwa PMDN memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu menghemat devisa, ketergantungan pada produk luar negeri yang lebih sedikit, memberikan dukungan pada kemajuan industri di dalam negeri melalui *forward linkage* dan *backward linkage*, berkontribusi dalam upaya peningkatan tenaga kerja yang terserap dari dalam negeri. Berdasarkan pada beberapa pengertian mengenai penanaman modal dalam negeri, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PMDN ialah suatu kegiatan menanamkan modal oleh investor dengan modal yang berasal dari dalam negeri untuk memberikan dukungan bagi usaha-usaha di dalam negeri. Perlu adanya upaya yang lebih optimal dalam mengembangkan penanaman dalam negeri dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian negara Indonesia. Melalui peningkatan yang terjadi pada PMDN maka diharapkan investor dalam negeri mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan investor asing sehingga dapat turut berperan serta dalam membawa perekonomian Indonesia kearah yang lebih maju.

2.2.6 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Teori pertumbuhan endogen (endogeneous growth theory) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki hubungan terhadap pengangguran dengan berbagai cara seperti peningkatan keterampilan, pengeluaran dalam pendidikan membantu meningkatkan keterampilan individu. Dengan keterampilan yang lebih baik, individu akan lebih kompetitif di pasar kerja, sehingga mengurangi risiko pengangguran. Penciptaan lapangan kerja, pendidikan yang baik berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Ketika lebih banyak orang memiliki keterampilan yang relevan, perusahaan akan lebih cenderung untuk mempekerjakan mereka. Selain itu, sektor yang berkembang seperti teknologi dan layanan membutuhkan tenaga kerja terampil. Fleksibilitas pasar kerja, pendidikan yang berkualitas menciptakan tenaga kerja yang lebih fleksibel. Individu yang terdidik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dalam permintaan pasar kerja, yang dapat mengurangi pengangguran struktural.

- Pendidikan sebagai sumber inovasi: Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mendorong inovasi teknologi dan pengetahuan yang berdampak pada peningkatan produktivitas.
- Pendidikan menciptakan modal manusia yang unggul: Pendidikan membantu membangun modal manusia yang mampu mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- Pembangunan berbasis pengetahuan: Negara-negara yang melakukan investasi besar dalam pendidikan lebih mampu bersaing secara global dan memanfaatkan ekonomi berbasis pengetahuan. Teori ini menyoroti bagaimana inovasi teknologi, peningkatan keterampilan, dan investasi dalam pendidikan memiliki dampak yang berkelanjutan dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena pengetahuan dan inovasi bersifat non-rival dan memiliki eksternalitas positif, kebijakan publik yang mendukung *research* dan *development* pendidikan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengeluaran pemerintah dapat didefinisikan sebagai aliran kas keluar yang mengurangi jumlah ekuitas dana yang dimiliki, kecuali yang berkaitan dengan distribusi kepada pemilik ekuitas dana. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah adalah dana yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat guna menggerakkan perekonomian di suatu wilayah (Halim, 2002: 68). Pengeluaran pemerintah, yang tercermin dalam belanja pemerintah, dibagi menjadi dua jenis: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung mencakup belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Menurut PP No. 18 Tahun 2002 mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 yaitu Pasal 80 sampai dengan Pasal 83. Dalam Pasal 80 diatur mengenai pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja negara, dan dari alokasi tersebut tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Sedangkan dalam Pasal 81 diatur mengenai pengalokasian APBD setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja daerah, dan alokasi anggaran ini digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang

menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 82 dan Pasal 83 mengatur mengenai hibah berupa Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, yang dikenal sebagai anggaran pendidikan, merujuk pada alokasi dana yang disediakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pasal 31 ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan setidaknya sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut catatan sejarah, pemerintah baru mulai menerapkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2010. Persentase yang signifikan ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan suatu negara. Meskipun persentase anggaran pendidikan dalam APBN telah ditetapkan pada 20% sejak tahun 2010, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam merealisasikan ketentuan ini.

(Wahid, 2012) Menyampaikan bahwa pentingnya pendanaan untuk pendidikan, pemerintah harus dapat membangun infrastruktur dan program-program yang terbaik. Salah satu cara praktis yang dapat dilakukan pemerintah untuk menginvestasikan dana untuk meningkatkan produktivitas adalah melalui belanja pendidikan. Distribusi pengeluaran pembangunan di bidang pembangunan dapat difokuskan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan ditunjukkan dengan alokasi 20 persen dari APBN untuk pendidikan.

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan akan berdampak pada pembangunan sektor ini, khususnya dengan meningkatkan proporsi siswa yang dapat menyelesaikan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, menurut (Winarti, 2014). Semakin tinggi tingkat rata-rata pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, maka semakin mudah bagi angkatan kerja untuk memahami, memanfaatkan, dan

mendapatkan keuntungan dari kemajuan teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi negara. Untuk mencapai pembangunan, sebuah negara harus berinvestasi lebih banyak di bidang kesehatan dan pendidikan.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan Pengangguran Terdidik dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dijelaskan dalam Hukum Okun. Teori ekonomi Hukum Okun (*Okun's law*) dalam (Kuncoro, 2013) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif linier antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, ketika terjadi kenaikan tingkat pengangguran akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya ketika ada kenaikan output yang dihasilkan akan menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka semakin sedikit pula jumlah pengangguran yang ada, karena pertumbuhan ekonomi tersebut lebih berfokus pada padat karya. Hal ini menciptakan peluang kerja baru dan lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia dibandingkan mesin atau teknologi canggih. Pertumbuhan ekonomi biasanya disertai dengan munculnya lapangan pekerjaan baru. Saat ekonomi tumbuh, produksi barang dan jasa juga meningkat, yang berarti kebutuhan akan tenaga kerja untuk memproduksinya juga bertambah. Terdapat hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, karena individu yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.3.2 Hubungan Pengangguran Terdidik dengan Penanaman Modal Asing

Menurut Sukirno (2004), hubungan antara investasi dan pengangguran dapat dipahami melalui teori pertumbuhan Harrod-Domar. Dalam teori ini, investasi didefinisikan sebagai perubahan dalam stok modal, yang memiliki hubungan langsung dengan pendapatan nasional. Oleh karena itu, investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah stok modal, yang berdampak pada sisi penawaran.

Dengan meningkatnya kapasitas produksi, akan diperlukan lebih banyak tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat berkurang. Berdasarkan teori Harrod-Domar, semakin besar kapasitas produksi, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, dengan asumsi "full employment."

Semakin tinggi tingkat investasi, semakin banyak lapangan kerja yang tercipta, yang akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Jumlah pekerjaan baru yang muncul akan mengurangi tingkat pengangguran. Investasi berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan produksi di negara-negara berkembang. Dengan demikian, investasi berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengatasi pengangguran.

2.3.3 Hubungan Pengangguran Terdidik dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Investasi merupakan elemen kunci karena selain mendorong peningkatan output secara signifikan, investasi juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan terhadap input. Hal ini pada akhirnya akan membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang mereka terima. Investasi memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. Peningkatan investasi pemerintah akan mempengaruhi perluasan kesempatan kerja di suatu daerah, karena investasi erat kaitannya dengan penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan atau pertumbuhan ekonomi di masa depan. Investasi juga merupakan faktor penting dalam pembentukan pendapatan daerah, serta memiliki pengaruh terhadap perekonomian lokal, dan berpotensi memperluas peluang kerja. Investasi yang memiliki efek pengganda dapat meningkatkan kesejahteraan, yang tercermin dari kenaikan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan, konsumsi barang dan jasa juga akan bertambah. Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa ini akan menciptakan lebih banyak peluang kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pengangguran terjadi karena tenaga kerja diserap dalam berbagai proyek investasi yang berorientasi pada program padat karya bukan berorientasi pada program padat modal yang justru akan mengurangi penggunaan tenaga kerja.

2.3.4 Hubungan Pengangguran Terdidik dengan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

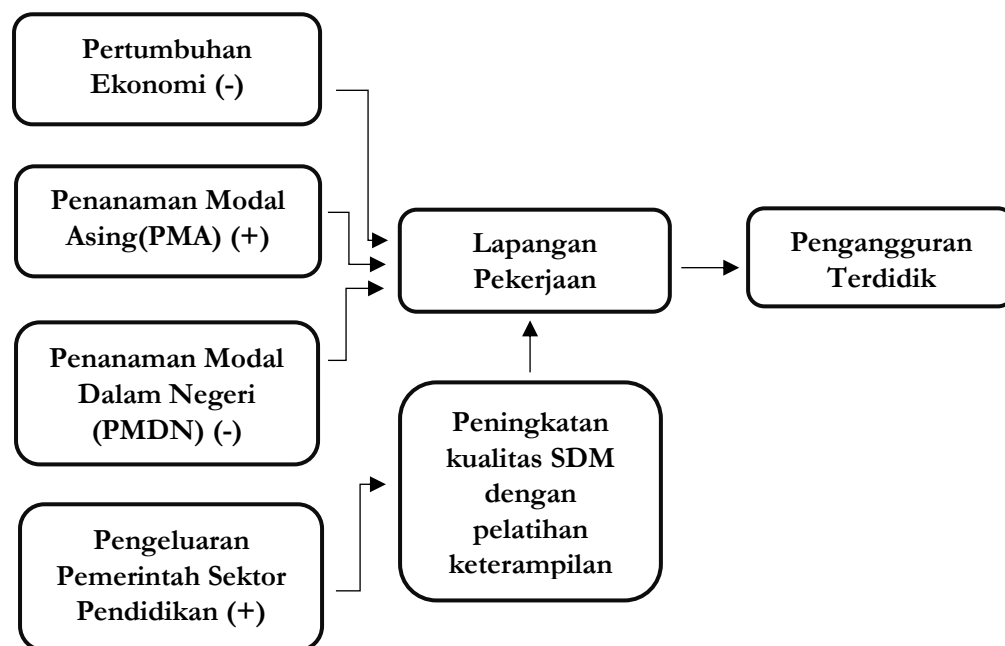
Pendidikan merupakan faktor penunjang penting dan kebutuhan mendasar dalam pemenuhan tingkat kesejahteraan seseorang. Hal utama yang menjadi tujuan adalah untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang salah satunya dapat dicapai dengan mudahnya akses pendidikan dan biaya yang murah. Adanya biaya pendidikan yang murah tidak bisa terlepas dari peran pemerintah yang memegang kendali penuh atas pemenuhan hak dasar warga negaranya dalam menuntut ilmu. Dalam teori Human Capital yang menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan sebagai bentuk pengembangan modal manusia. Menurut teori ini, pendidikan dianggap sebagai investasi yang dapat meningkatkan produktivitas individu dan pada gilirannya, meningkatkan pendapatan dan peluang kerja. Namun, ketika pengangguran terdidik terjadi, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendidikan yang dimiliki dan kebutuhan pasar. Dalam konteks teori modal manusia pengangguran terdidik terjadi karena adanya mismatch keterampilan antara pendidikan yang diperoleh dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, selain itu kegagalan sistem pendidikan yang tidak mampu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Dengan adanya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan standar dan sistem pendidikan masyarakat di suatu negara, terlebih lagi jika pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat sudah mencakup adanya pelatihan keterampilan dan keahlian untuk memenuhi kualifikasi dan standarisasi yang memadai dalam dunia kerja sehingga diharapkan angkatan kerja yang sudah lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka sehingga tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan.

2.3 Hipotesis Penelitian

1. H_1 : Diduga Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.
2. H_2 : Diduga Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.
3. H_3 : Diduga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.
4. H_4 : Diduga Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 3 Kerangka Penelitian

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh langsung dan negatif terhadap Pengangguran Terdidik, karena dengan asumsi ketika pertumbuhan ekonomi meningkat akan menambah output yang dihasilkan sehingga perusahaan akan menambah permintaan tenaga kerja dan pengangguran menurun.
2. Variabel Penanaman Modal Asing berpengaruh langsung dan positif terhadap Pengangguran Terdidik, karena dengan asumsi ketika modal asing yang masuk merupakan modal yang berorientasi pada padat modal yang akan menambah alat produksi dan transformasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi sehingga memerlukan tenaga kerja professional , maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin sedikit.
3. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh langsung dan negatif, karena dengan asumsi ketika modal yang berasal dari dalam negeri lebih berorientasi pada sistem padat karya yang memerlukan banyak tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat menurun seiring dibukanya perusahaan atau proyek pembangunan baru.
4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh tidak langsung dan positif terhadap Pengangguran terdidik yang seharusnya melalui peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan keterampilan, dengan asumsi ketika pengeluaran pemerintah naik seperti pemberian beasiswa atau KIP yang menysasar kalangan masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan. Dengan adanya kesempatan tersebut maka akan mempengaruhi sudut pandang baru dalam mencari pekerjaan, dengan asumsi bahwa orang yang sudah berpendidikan tinggi ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Padahal lapangan pekerjaan yang diinginkan tidak sebanyak dengan jumlah angkatan kerja yang berpendidikan, sedangkan masih banyak sektor yang belum diminati oleh tenaga kerja terdidik seperti pertanian dan peternakan yang seharusnya dengan ilmu baru yang didapatkan mampu menciptakan inovasi atau terobosan baru dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Model Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Open Data Jawa Barat, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan, artikel, buku, jurnal, dan website yang mendukung penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah variabel dependen adalah Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat dan variabel independen adalah Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.

3.2 Definisi Variabel Operasional

Penelitian ini menganalisis beberapa variabel yang saling terkait, yang terdiri dari dua jenis variabel, yaitu:

a. Variabel Dependen (Y)

Analisis data untuk variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terdidik (TPT) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018-2022, yang diukur dalam persentase. Pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Barat mencakup jumlah pencari kerja dari angkatan kerja yang memiliki pendidikan minimal SLTA pada periode tertentu. Data mengenai pengangguran terdidik diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang mencakup 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018-2022.

b. Variabel Independen (X)

i. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat adalah keseluruhan jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir di Jawa Barat yang dihasilkan oleh perekonomian masyarakat dalam suatu periode tertentu. Dalam perolehan data Pertumbuhan Ekonomi tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022, yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. Dimana penghitungan Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan merupakan Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga konstan, dengan satuan persen.

ii. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Jawa Barat merupakan realisasi kumulatif dari investasi penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten/Kota selama periode 2018-2022, yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat. Dalam perolehan data Penanaman Modal Asing tersebut bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan satuan triliun rupiah.

iii. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat merupakan realisasi kumulatif dari investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kabupaten/Kota selama periode 2018-2022, yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat. Dalam perolehan data Penanaman Modal Asing tersebut bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan satuan triliun rupiah.

iv. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP)

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) mencakup seluruh biaya yang dikelola dengan prinsip keadilan dan pemerataan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Data belanja pemerintah daerah yang digunakan

dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia dengan nilai dalam triliun rupiah.

3.3 Metode Analisis

Dalam metode analisis data, penelitian ini memilih untuk menggunakan data panel dan mengolah data dengan bantuan perangkat lunak Eviews12. Data panel yang dimaksud adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross section* (Widarjono, 2013). Struktur persamaan data panel dapat ditulis sebagai berikut (Sriyana, 2015):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \text{Log}X_{2it} + \beta_3 \text{Log}X_{3it} + \beta_4 \text{Log}X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	: Tingkat Pengangguran Terdidik (persen)
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: Koefisien X_1, X_2, X_3, X_4
X_1	: Pertumbuhan Ekonomi (persen)
$\text{Log}X_2$	: Penanaman Modal Asing (triliun rupiah)
$\text{Log}X_3$	: Penanaman Modal Dalam Negeri (triliun rupiah)
$\text{Log}X_4$	: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
ε_{it}	: Variabel gangguan (<i>error</i>)

Keuntungan dari penggunaan analisis data panel terletak pada gabungan data *cross section* dan *time series*, yang menghasilkan jumlah data yang lebih besar. Dengan meningkatnya jumlah observasi, derajat kebebasan juga akan bertambah. Ada tiga model pendekatan estimasi dalam analisis data panel, yaitu: 1) Pendekatan *Common Effects*, 2) *Fixed Effects Least Square Dummy Variables* (FEM LSDV), dan 3) *Random Effects* (Sriyana, 2015).

3.3.1 Common Effects Model (CEM)

Uji *common effect* adalah metode analisis data yang tidak mempertimbangkan perbedaan antara waktu dan individu. Dengan teknik ini, kita dapat menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan model *common effect*, diasumsikan bahwa perilaku data di berbagai kabupaten serupa pada berbagai periode. Persamaan regresi untuk model *common effect* dapat dinyatakan sebagai berikut (Widarjono, 2018):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \text{Log}X_{2it} + \beta_3 \text{Log}X_{3it} + \beta_4 \text{Log}X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

3.3.2 Fixed Effect Model (FEM)

Teknik *fixed effect model* berbeda dari teknik *common effect model*, karena fixed effect model menggunakan variabel dummy untuk mengestimasi data panel dan mengidentifikasi perbedaan intersep. Dalam estimasi *fixed effect models*, metode yang digunakan juga dikenal sebagai *least squares dummy variable* (LSDV). Persamaan untuk *fixed effect* model dalam bentuk linier adalah sebagai berikut (Widarjono, 2018):

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \text{Log}X_{2it} + \beta_3 \text{Log}X_{3it} + \beta_4 \text{Log}X_{4it} + e_{it}$$

3.3.3 Random Effect Model (REM)

Variabel dummy yang digunakan dalam model *fixed effect* berfungsi untuk mengidentifikasi model yang sebenarnya. Namun, penggunaan variabel dummy ini mengakibatkan penurunan derajat kebebasan, yang pada gilirannya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan error terms atau dengan menerapkan teknik *random effect model*. Estimasi model ini mengasumsikan adanya hubungan antara *error terms* di berbagai waktu dan individu (Widarjono, 2018).

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 \text{Log}X_{2it} + \beta_3 \text{Log}X_{3it} + \beta_4 \text{Log}X_{4it}$$

3.4 Pemilihan Model Data Panel

Uji Chow (F-statistic) dan Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai. Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Pooled Least Square/Common Effect* atau *Fixed Effect* Model. Sementara itu, Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah *Fixed Effect* model atau *Random Effect* Model yang lebih baik. Berikut adalah penjelasan mengenai pengujian Chow Test dan Hausman Test:

3.4.1 Uji Chow Test (Uji F-statistik)

Uji Chow, yang diperkenalkan oleh Gregory Chow pada tahun 1960, adalah uji statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok atau subkelompok dalam model regresi. Uji ini khususnya digunakan untuk menilai apakah terdapat perbedaan struktural dalam model regresi linier antara kelompok pada periode waktu yang berbeda. Uji Chow bertujuan untuk menentukan

apakah model *common effect* atau model *fixed effect* lebih sesuai untuk digunakan dalam estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : *Common effect* merupakan model terbaik

Ha : *Fixed effect* merupakan model terbaik

Pemilihan model didasarkan pada nilai probabilitas *Chi Square* yang diperoleh dari analisis data. Dengan membandingkan nilai probabilitas Chi Square terhadap tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, kita dapat menentukan model terbaik berdasarkan Chow test. Jika nilai probabilitas Chi Square lebih besar dari $\alpha = 5\%$, maka H0 diterima dan model *Common Effect Model* (CEM) dipilih. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Chi Square kurang dari $\alpha = 5\%$, maka Ha diterima dan model *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih (Widarjono, 2018).

3.4.2 Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara *fixed effect* atau *random effect*. Hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

H0 : Model *random effect* adalah yang terbaik

Ha : Model *fixed effect* adalah yang terbaik

Pemilihan model didasarkan pada nilai probabilitas *cross section* yang diperoleh dari analisis data. Dengan membandingkan nilai probabilitas *cross section* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, kita dapat menentukan model terbaik berdasarkan Hausman test. Jika nilai probabilitas *cross section* lebih besar dari $\alpha = 5\%$, maka H0 diterima dan model *Random Effect Model* (REM) dipilih. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *cross section* kurang dari $\alpha = 5\%$, maka H0 ditolak dan model *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih (Widarjono, 2018).

3.4.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk memilih antara *common effect* atau *random effect* sebagai model terbaik dalam estimasi regresi data panel. Hipotesis uji ini adalah:

H_0 : *Common effect* adalah model terbaik

H_a : *Random effect* adalah model terbaik

Pemilihan model didasarkan pada nilai probabilitas *Breusch-Pagan* yang diperoleh dari analisis data. Dengan membandingkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, kita dapat menentukan model terbaik berdasarkan uji LM. Jika nilai probabilitas *Breusch-Pagan* lebih besar dari $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak dan model *Random Effect Model* (REM) dipilih. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Breusch-Pagan* kurang dari $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima dan model *Common Effect Model* (CEM) dipilih (Widarjono, 2018).

3.5 Pengujian Statistik

Pengujian statistik untuk menilai keakuratan fungsi regresi dalam memprediksi nilai aktual, dapat digunakan uji statistik. Salah satu uji yang dapat dilakukan adalah uji T, yang memeriksa nilai koefisien determinasi (R^2). Uji T digunakan untuk menentukan apakah ada pengaruh secara parsial, sementara Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah ada pengaruh secara simultan.

3.5.1 Koefisien Dererminasi (R^2)

R^2 adalah ukuran yang tidak pernah berkurang dari penjelasan jumlah variabel yang ada, kecuali jika variabel baru ditambahkan dengan regresor lainnya secara sempurna. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menggambarkan seberapa besar proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Dengan demikian, kita dapat mengukur seberapa besar proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1; semakin besar nilai R^2 , semakin baik model dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

3.5.2 Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis uji F adalah sebagai berikut:

$H_0 : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a : \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \neq 0$ (ada pengaruh)

Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

H_0 : diterima jika nilai statistik F lebih kecil dari nilai F tabel, yang berarti variabel independen yang dipilih tidak signifikan dalam menjelaskan variabel dependen.

H_a : diterima jika nilai statistik F lebih besar dari nilai F tabel, yang menunjukkan bahwa variabel independen yang dipilih signifikan dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.3 Uji t

Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel secara individu. Prosedur uji t melibatkan perbandingan antara nilai t hitung dan t tabel. H_0 akan ditolak jika t hitung lebih besar dari t tabel, dan sebaliknya H_0 diterima jika t hitung lebih kecil dari t tabel. Hipotesis nol dinyatakan sebagai berikut:

a. Variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

$H_0 : \beta_0 = 0$ Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

$H_a : \beta_1 < 0$ Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

b. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

$H_0 : \beta_0 = 0$ Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

$H_a : \beta_1 > 0$ Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

c. Variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

$H_0 : \beta_0 = 0$ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

$H_a : \beta_1 < 0$ Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

d. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

$H_0 : \beta_0 = 0$ Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

$H_a : \beta_1 > 0$ Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder, yang bersumber dari berbagai situs web resmi di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel (*panel pooled data*), yaitu merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Model ini muncul karena gabungan antara kedua data tersebut akan secara utuh menggambarkan perilaku variabel ekonomi, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel merupakan gabungan dari dua *data time series* dan *cross section* yang mampu menyediakan data lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*). Data *time series* penelitian ini berupa data yang digunakan dari tahun 2018-2022, sedangkan data *cross section* berupa data dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP). Sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka Terdidik dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Alat yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan EViews 12. Metode analisis yang digunakan berupa analisis ekonometrik.

4.2 Hasil Pengolahan Data

Statistika deskriptif adalah metode analisis statistik yang menggunakan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian. Nilai rata-rata (*mean*) diperoleh

dengan membagi total nilai data dengan jumlah data, sedangkan standar deviasi merupakan akar jumlah kuadrat dari perbedaan nilai data dengan banyaknya data. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang ditemukan di dalam data, sedangkan nilai minimum adalah nilai terendah yang terdapat pada data. Hasil dari analisis statistika deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif

	TPT (Persen)	PDRB (Persen)	PMA	PMDN	PPSP
Mean	0.051858	3.709333	26.04849	26.50798	27.53477
Median	0.049148	4.960000	26.86093	26.98011	27.65533
Maximum	0.099674	7.850000	31.29603	30.63704	28.61943
Minimum	0.013434	-3.800000	15.27529	18.06401	25.87880
Std. Dev.	0.019211	2.830314	3.412151	2.619369	0.636796
Observation	135	135	135	135	135

Sumber: Lampiran I.

Analisis statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan hasil dari jumlah observasi dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2018-2022 yang berjumlah 135 observasi terdiri dari (5 *time series* dan 27 *cross section*). Didapatkan hasil dari nilai rata-rata (*mean*) variabel Tingkat Pengangguran Terdidik selama kurun waktu 2018-2022 sebesar 0,051858%, dengan nilai tertinggi sebesar 0,099674%, dan nilai terendah sebesar 0,013434%. Nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh variabel Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2018-2022 sebesar sebesar 3,709333%, dengan nilai tertinggi sebesar 7,850000%, dengan nilai terendah sebesar -3,800000%.

Nilai rata-rata (*mean*) yang didapatkan variabel Penanaman Modal Asing (PMA) selama kurun waktu 2018-2022 sebesar 26.04849 rupiah, dengan nilai tertinggi sebesar 31.29603 rupiah, dengan nilai terendah sebesar 15.27529 rupiah. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama kurun waktu 2018-2022

sebesar 26.50798 rupiah, dengan nilai tertinggi sebesar 30.63704 rupiah, dengan nilai terendah sebesar 18.06401 rupiah. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) selama kurun waktu 2018-2022 sebesar 27.53477 rupiah, dengan nilai tertinggi sebesar 28.61943 rupiah, dengan nilai terendah sebesar 25.87880 rupiah.

Kemudian dalam pemilihan model terbaik bergantung pada asumsi yang benar sehingga dapat digunakan oleh peneliti dan memuat kepatuhan terhadap prinsip pemrosesan data statistik, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh sebab itu, proses awal yang perlu dilakukan adalah memilih model terbaik dan yang paling sesuai dari tiga model data panel yang tersedia seperti model *fixed effect*, model *common effect*, dan model *random effect*, dengan hasil model sebagai berikut.

4.2.1 Regresi Fixed Effect Model

Model *Fixed Effect* adalah model yang mengasumsikan adanya perbedaan intercept di dalam persamaan, dengan teknik mengestimasi data panel dengan variabel dummy untuk mengetahui adanya perbedaan *intercept*. *Fixed effect* didasarkan pada adanya perbedaan intercept subjek penelitian. Namun, interceptnya sama antar waktu (*time invariant*), model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar subjek dan antar waktu. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (SLDV) yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Regresi Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.025406	0.217388	0.116869	0.9072
PDRB_GROWTH__	-0.001853	0.000273	-6.784490	0.0000
LOGPMA	0.000319	0.000612	0.521534	0.6031
LOGPMDN	-0.000790	0.000588	-1.342281	0.1824
LOGPPSP	0.001668	0.007819	0.213389	0.8314
R-squared		0.842353		
F-statistic		18.52339		
Prob (F-Statistic)		0.000000		

Sumber: Lampiran II.

4.2.2 Regresi Common Effect Model

Model *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dibandingkan dengan kedua model lainnya, *common effect* yaitu model regresi yang mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu dengan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Hasil regresi dari model *common effect* dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 3 Hasil Regresi Common Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.189437	0.071294	2.657114	0.0089
PDRB_GROWTH__	-0.001732	0.000509	-3.402382	0.0009
LOGPMA	0.002155	0.000701	3.075568	0.0026
LOGPMDN	0.001509	0.000815	1.851335	0.0664
LOGPPSP	-0.008255	0.002840	-2.906338	0.0043
R-squared		0.270386		
F-statistic		12.04412		
Prob (F-Statistic)		0.000000		

Sumber: Lampiran III.

4.2.3. Regresi Random Effect Model

Model *Random Effect* muncul karena dalam model *Fixed Effect* terdapat variabel dummy yang digunakan untuk menggantikan ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, penggunaan variabel dummy dapat mengakibatkan berkurangnya derajat kebebasan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel error, yang dikenal sebagai metode *Random Effect*. Dalam model ini, estimasi data panel melibatkan variabel gangguan yang

saling berhubungan antara waktu dan individu. Penggunaan model *Random Effect* harus memenuhi syarat bahwa jumlah *cross section* lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Hasil regresi dari model *Random Effect* dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 4 Hasil Regresi Random Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.044346	0.110141	0.402626	0.6879
PDRB_GROWTH__	-0.001853	0.000272	-6.815522	0.0000
LOGPMA	0.000905	0.000564	1.603032	0.1114
LOGPMDN	-0.000381	0.000559	-0.681007	0.4971
LOGPPSP	3.30E-05	0.004109	0.008033	0.9936
R-squared		0.260485		
F-statistic		11.44774		
Prob (F-Statistic)		0.000000		

Sumber: Lampiran IV

4.3 Pemilihan Model Regresi

Penentuan model terbaik di antara model *random effect*, *fixed effect*, dan *common effect* dilakukan melalui tiga teknik estimasi model. Ketiga teknik ini diterapkan dalam regresi data panel untuk mendapatkan model yang paling sesuai dalam mengestimasi regresi data panel. Uji pertama adalah Chow Test, yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau model *fixed effect*. Uji kedua adalah Hausman Test, yang digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *random effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel. Sementara itu, uji ketiga adalah *Lagrange Multiplier* (LM) Test, yang digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau model *random effect*. Setiap uji ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

4.3.1 Chow Test

Uji Chow test merupakan langkah berikutnya setelah mendapatkan hasil dari analisis regresi model *common effect* dan model *fixed effect*. Uji Chow test adalah tahapan prosedur untuk membandingkan model antara *common effect* dengan model *fixed effect*. Dapat disimpulkan apabila nilai probabilitas *cross-section F* nya lebih besar dari alpha (5%) maka didapatkan model terbaiknya adalah *common effect*. Namun, sebaliknya jika nilai probabilitas *cross-section F* lebih kecil dari alpha (5%) maka model terbaiknya adalah model adalah *fixed effect*. Hasil pengujian Chow test dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Chow Test

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.512593	(26,104)	0.0000
Cross-section Chi-squared	206.841177	26	0.0000

Sumber: Lampiran V.

Tabel di atas menunjukkan hasil nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000 maka lebih kecil ($<$) dari alpha (5%) dan nilai probabilitas *Cross-section Chi-squared* sebesar 0,0000 lebih kecil ($<$) dari alpha (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 atau menerima H_a yang artinya model yang terbaik dan tepat adalah *fixed effect* model dibandingkan model *common effect* model.

4.3.2 Hausman Test

Uji Hausman test merupakan pengujian lanjutan dari uji Chow test yang menunjukkan bahwa regresi yang lebih tepat digunakan adalah regresi *fixed effect* model. Uji Hausman test digunakan untuk membandingkan antara *random effect* model dengan *fixed effect* model. Apabila nilai probabilitas *Cross-section random* lebih besar dari alpha (5%) maka didapatkan model terbaik *random effect* model. Jika nilai probabilitas *Cross-section random* lebih kecil dari alpha (5%) maka didapatkan model terbaik *fixed effect* model. Hasil Pengujian Hausman test dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Hausman Test

Test Summary	Chi-Squared	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.445694	4	0.0143

Sumber: Lampiran VI.

Hasil dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar 0,0143 lebih kecil ($<$) dari alpha (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 atau menerima H_a yang artinya model terbaik dan tepat adalah *fixed effect* model dibandingkan *random effect* model.

4.3.3 Lagrange Multiplier (LM) Test

Uji *Lagrange multiplier test* merupakan pengujian yang dilakukan setelah melakukan uji Chow test dan Hausman test. Uji *Lagrange multiplier test* merupakan uji untuk membandingkan antara *common effect* model dengan *random effect* model. Apabila nilai probabilitas *P-Value Breusch-Pagan Cross-section* lebih besar dari alpha (5%) maka didapatkan model terbaik *common effect* model. Namun, jika nilai probabilitas Hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya yaitu Chow test dan Hausman test menjelaskan bahwa regresi yang tepat untuk digunakan adalah regresi *fixed effect* model dan *random effect* model. Namun *P-Value Breusch-Pagan Cross-section* lebih kecil dari alpha (5%) maka didapatkan model terbaiknya yaitu *random effect* model. Hasil pengujian *Lagrange multiplier test* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Lagrange Multiplier (LM) Test

	Test Hypothesis Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	106.5357 (0.0000)	0.176153 (0.6747)	106.7119 (0.0000)

Sumber : Lampiran VII.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar 0,0000 lebih kecil ($<$) dari alpha (5%) . Maka dapat disimpulkan bahwa menolak

H0 atau menerima Ha sehingga dapat diartikan jika model yang terbaik dan tepat adalah *random effect* model dibandingkan *common effect* model.

4.4 Model Regresi Terbaik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Koefisien Dererminasi (R^2), Uji F atau Simultan (Uji Kelayakan Model), Uji t atau Parsial (Uji Signifikan), dan Intercept menggunakan regresi *fixed effect* model.

Dari hasil regresi yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan bahwa model terbaik yaitu *fixed effect* model. Hasil dari regresi *fixed effect* model dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 8 Model Regresi Terbaik

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.025406	0.217388	0.116869	0.9072
PDRB_GROWTH__	-0.001853	0.000273	-6.784490	0.0000
PMA__RP_	0.000319	0.000612	0.521534	0.6031
PMDN __RP_	-0.000790	0.000588	-1.342281	0.1824
PPSP_RP_	0.001668	0.007819	0.213389	0.8314
R-squared		0.842353		
F-statistic		18.52339		
Prob (F-Statistic)		0.000000		

Sumber: Lampiran II.

4.4.1 Uji Koefisien Dererminasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan uji untuk mengukur proporsi atau persentase total variasi Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi adalah tujuan dari pengujian ini. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variasi atau determinasi dari variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing,

Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *R-Squared* sebesar 0,842353 atau 84,2353%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) mampu menjelaskan variabel Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat sebesar 84,2353%, sedangkan sisanya yaitu 15,7647% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

4.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) secara simultan atau berpengaruh secara bersama terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Pengangguran Terdidik. Hasil dari pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 18.52339 dengan nilai probabilitas sebesar $0,00000 < 0,05\%$, maka dapat disimpulkan bahwa menolak H_0 dan menerima H_a , artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.

4.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

1. Hasil dari Uji t pada variabel Pertumbuhan Ekonomi diperoleh koefisien dari produk domestik regional bruto negatif sebesar -0,001853% dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05\%$ sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto negatif dan berpengaruh, artinya variabel produk domestik regional bruto

berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022

2. Hasil dari Uji t variabel Penanaman Modal Asing (PMA) diperoleh koefisien dari penanaman modal asing sebesar 0,000319 rupiah dengan nilai probabilitas sebesar $0,6031 > 0,05\%$ sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penanaman modal asing positif dan tidak berpengaruh, artinya variabel penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022

3. Hasil dari Uji t variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diperoleh koefisien dari penanaman modal dalam negeri sebesar -0,000790 rupiah dengan nilai probabilitas $0,1824 < 0,05$ sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penanaman modal dalam negeri negatif dan berpengaruh, artinya variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.

4. Hasil dari Uji t variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) diperoleh koefisien dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 0,001668 rupiah dengan nilai probabilitas sebesar $0,8314 > 0,05\%$ sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan positif dan tidak berpengaruh, artinya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022.

4.5 Interpretasi Hasil

$$Y = 0,025406 - 0,001853 (\text{Pertumbuhan Ekonomi}) + 0,000319 (\text{PMA}) - 0,000790(\text{PMDN}) + 0,001668 (\text{PPSP})$$

1. Nilai konstanta sebesar 0,025406 artinya jika variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) dianggap tetap, maka variabel Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 sebesar 2,5406%.

2. Nilai koefisien variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,001853, sehingga jika variabel Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel Tingkat Pengangguran Terdidik mengalami penurunan sebesar -0,1853%.
3. Nilai koefisien variabel Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 0,000319, sehingga jika nilai variabel (PMA) mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel Tingkat Pengangguran Terdidik mengalami peningkatan sebesar 0,0319%.
4. Nilai koefisien variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar -0,000790, jika nilai variabel (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel Tingkat Pengangguran Terdidik mengalami penurunan sebesar -0,079 %.
5. Nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) sebesar 0,001668, jika variabel (PPSP) mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah, maka variabel Tingkat Pengangguran Terdidik mengalami peningkatan sebesar 0,1668%.

4.6 Intercept

Tabel 4. 9 Cross Section Fixed Effect Model

KAB/KOTA	Effect	Intercept	Hasil
KAB. BOGOR	0,014297	0,2173	0,231597
KAB. SUKABUMI	-0,011137	0,2173	0,206163
KAB. CIANJUR	-0,013682	0,2173	0,203618
KAB. BANDUNG	-0,009066	0,2173	0,208234
KAB. GARUT	-0,016027	0,2173	0,201273
KAB. TASIKMALAYA	-0,021057	0,2173	0,196243
KAB. CIAMIS	-0,023411	0,2173	0,193889
KAB KUNINGAN	0,000164	0,2173	0,217464
KAB. CIREBON	-0,002319	0,2173	0,214981
KAB. MAJALENGKA	-0,021367	0,2173	0,195933
KAB. SUMEDANG	0,001048	0,2173	0,218348
KAB. INDRAMAYU	-0,015456	0,2173	0,201844
KAB. SUBANG	-0,006413	0,2173	0,210887
KAB. PURWAKARTA	0,007314	0,2173	0,224614
KAB. KARAWANG	0,011047	0,2173	0,228347
KAB. BEKASI	0,017906	0,2173	0,235206
KAB. BANDUNG BARAT	-0,005509	0,2173	0,211791
KAB. PANGANDARAN	-0,030289	0,2173	0,187011

KOTA. BOGOR	0,023498	0,2173	0,240798
KOTA. SUKABUMI	0,019259	0,2173	0,236559
KOTA. BANDUNG	0,023765	0,2173	0,241065
KOTA. CIREBON	0,009112	0,2173	0,226412
KOTA. BEKASI	0,02527	0,2173	0,24257
KOTA. DEPOK	0,015868	0,2173	0,233168
KOTA. CIMAHI	0,025752	0,2173	0,243052
KOTA. TASIKMALAYA	-0,006505	0,2173	0,210795
KOTA. BANJAR	-0,012063	0,2173	0,205237

Sumber: Olah Data Eviews 12

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat dan diamati bahwa setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki koefisien model yang acak dan berbeda-beda. Dengan ini menggambarkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memiliki dampak pengaruh yang berbeda terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

1. Kabupaten Bogor

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Bogor sebesar 0,231597 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Bogor sebesar 0,231597.

2. Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Sukabumi sebesar 0,206163 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Sukabumi sebesar 0,206163.

3. Kabupaten Cianjur

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Cianjur sebesar 0,203618 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor

Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Cianjur sebesar 0,203618.

4. Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Bandung sebesar 0,208234 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Bandung sebesar 0,208234.

5. Kabupaten Garut

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Garut sebesar 0,201273 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Garut sebesar 0,201273.

6. Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,196243 maka dapat disimpulkan apabila Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0,196243.

7. Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Ciamis sebesar 0,193889 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Ciamis sebesar 0,193889.

8. Kabupaten Kuningan

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Kuningan sebesar 0,217464 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran

Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Kuningan sebesar 0,217464.

9. Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Cirebon sebesar 0,214981 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Cirebon sebesar 0,214981.

10. Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Majalengka sebesar 0,195933 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Majalengka sebesar 0,195933.

11. Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Sumedang sebesar 0,218348 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Sumedang sebesar 0,218348.

12. Kabupaten Indramayu

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Indramayu sebesar 0,201844 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Indramayu sebesar 0,201844.

13. Kabupaten Subang

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Subang sebesar 0,210887 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor

Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Subang sebesar 0,210887.

14. Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Purwakarta sebesar 0,224614 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Purwakarta sebesar 0,224614.

15. Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Karawang sebesar 0,228347 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Karawang sebesar 0,228347.

16. Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Bekasi sebesar 0,235206 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Bekasi sebesar 0,235206.

17. Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,211791 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,211791.

18. Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kabupaten Pangandaran sebesar 0,187011 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran

Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kabupaten Pangandaran sebesar 0,187011.

19. Kota Bogor

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kota Bogor sebesar 0,240798 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kota Bogor sebesar 0,240798.

20. Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kota Sukabumi sebesar 0,236559 maka dapat disimpulkan apabila Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kota Sukabumi sebesar 0,236559.

21. Kota Bandung

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kota Bandung sebesar 0,241065 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kota Bandung sebesar 0,241065.

22. Kota Cirebon

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kota Cirebon sebesar 0,226412 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kota Cirebon sebesar 0,226412.

23. Kota Bekasi

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kota Bekasi sebesar 0,24257 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kota Bekasi sebesar 0,24257.

24. Kota Depok

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kota Depok sebesar 0,233168 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kota Depok sebesar 0,233168.

25. Kota Cimahi

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kota Cimahi sebesar 0,243052 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kota Cimahi sebesar 0,243052.

26. Kota Tasikmalaya

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kota Tasikmalaya sebesar 0,210795 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kota Tasikmalaya sebesar 0,210795.

27. Kota Banjar

Berdasarkan tabel 4.9 nilai intercept pada Kota Banjar sebesar 0,205237 maka dapat disimpulkan apabila variabel Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dianggap tetap, maka Tingkat Pengangguran Terdidik pada Kota Banjar sebesar 0,205237.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan diperoleh hasil yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.7.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi bernilai negatif dan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terdidik. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar $0,0000 < 0,05$ yang berarti Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat, sementara nilai koefisien Pertumbuhan Ekonomi terdapat pengaruh negatif sebesar $-0,001853$ karena apabila Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan, maka pengangguran terdidik mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan, maka pengangguran terdidik akan mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan dengan adanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 persen akan berpengaruh terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terdidik sebesar $-0,1853\%$.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang telah disampaikan oleh Arthur Melvin Okun (*Okun's Law*) yang menyatakan bahwa dengan adanya kenaikan PDRB mampu untuk menurunkan angka pengangguran. Di negara berkembang Hukum Okun ini digunakan sebagai solusi bagaimana cara mengatasi masalah pengangguran. Dalam Hukum Okun juga mengemukakan adanya hubungan negatif antara PDRB dengan pengangguran, hal ini dapat terjadi karena apabila PDRB mengalami peningkatan akan menyebabkan permintaan tenaga kerja dari perusahaan yang dalam hal ini produsen meningkat sehingga pengangguran akan menurun. Namun keadaan ini berbanding terbalik apabila PDRB turun akan menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja karena produsen akan mengurangi jumlah produksi yang dapat berakibat terhadap pengangguran yang meningkat. (Alfin Waskito Nugroho, 2022)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Sari Silaban *et al.*, 2020). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Sumatera Utara

Periode 2003-2019. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2019.) Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa PDRB secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Aceh.

4.7.2 Pengaruh PMA terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PMA bernilai positif dan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa PMA tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar $0,6031 > 0,05$ yang artinya tidak berpengaruh, sementara nilai koefisien PMA sebesar $0,000319$ yang berarti jika nilai PMA naik sebesar 1 rupiah akan menyebabkan Tingkat Pengangguran Terdidik meningkat sebesar $0,0319\%$.

Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Astuti & Gunawan, 2024), yang menunjukkan bahwa ketika negara maju melakukan investasi asing, mereka cenderung menerapkan budaya dan teknik dari negara asalnya. Negara maju sering memiliki faktor produksi yang padat modal. Oleh karena itu, investasi asing yang diterapkan di negara berkembang cenderung mengurangi kebutuhan tenaga kerja karena teknik padat modal dan teknologi tinggi biasanya menawarkan produktivitas dan efisiensi yang lebih baik, menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Selain itu, teknologi tinggi umumnya memerlukan tenaga kerja dengan kualifikasi yang lebih tinggi dibandingkan industri padat karya. Tujuan pemerintah untuk mengurangi pengangguran menjadi sulit tercapai jika peningkatan industri padat modal hanya menyerap sedikit tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang tinggi, sementara di Jawa Barat, tenaga kerja masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang kurang kompetitif.

Penelitian ini sesuai dengan data dari DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa penanaman modal asing (PMA) tidak terlalu berpengaruh dalam proses penyerapan tenaga kerja walaupun penerimaan modal asing (PMA) tertinggi secara nasional. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan menjadi sektor yang mendominasi dengan nilai sebesar Rp 70,3 triliun rupiah. Tetapi sektor

industri pengolahan tidak termasuk dalam lima besar sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Pada tahun 2023 penanaman modal asing (PMA) per 1 triliun hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,017 orang dan sepanjang tahun 2023 hanya mampu menyerap 124,643 orang lebih rendah dibandingkan penanaman modal dalam negeri.

4.7.3 Pengaruh PMDN terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik

Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PMDN bernilai negatif dan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa PMDN berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya sebesar $0,1824 > 0,05$ yang berarti PMDN berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat, sementara nilai koefisien PMDN sebesar $-0,000790$, yang berarti jika nilai PMDN naik sebesar 1 rupiah maka dapat mengurangi Tingkat Pengangguran Terdidik sebesar $-0,079\%$.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Aziz Salim, 2023) Yang menyatakan bahwa PMDN memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sulawesi tahun 2011-2020. Hal tersebut dapat disebabkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika perusahaan atau individu maupun pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eef Saefulloh dan Renjana Fitriana, 2017.) yang mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Naiknya investasi dapat menyebabkan pengangguran menurun karena disaat terjadinya kenaikan tingkat investasi, maka akan banyak terdapat industri atau perusahaan. Dengan banyaknya

terdapat industri dan perusahaan akibat terjadinya kenaikan tingkat investasi, maka akan banyak menyerap tenaga kerja karena investasi berorientasi pada padat karya.

Penelitian ini sesuai dengan data dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) berkontribusi signifikan dalam proses penyerapan tenaga kerja walaupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) tertinggi kedua secara nasional. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan menjadi sektor yang mendominasi dengan nilai investasi sebesar Rp 33,3 triliun rupiah. Pada tahun 2023, penanaman modal dalam negeri (PMDN) per 1 triliun mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,489 dan sepanjang tahun 2023 mampu menyerap 131,056 orang lebih tinggi dibandingkan penanaman modal asing.

4.7.4 Pengaruh PPSP terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Terdidik

Hasil pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PPSP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa nilai probabilitasnya sebesar $0,9825 > 0,05$, yang berarti tidak signifikan, dan nilai koefisiennya sebesar 0,001668. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan PPSP sebesar 1 rupiah, maka akan menyebabkan peningkatan Tingkat Pengangguran Terdidik sebesar 0,1668%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Militina & Rachma Utary, 2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal tersebut dapat terjadi karena pengeluaran pemerintah yang tinggi untuk sektor pendidikan belum dapat menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menekan tingkat pengangguran terbuka. Justru kemungkinan besar akan menambah pengangguran intelektual yang tercipta dari lulusan pendidikan yang kurang siap kerja dan profesional. Hal ini lah yang membuat pengaruh pengeluaran anggaran bidang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap menekan jumlah pengangguran khususnya pengangguran terdidik

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi bernilai negatif dan berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. Sesuai Hukum Okun (*Okun's Law*) hal ini dapat terjadi karena ketika terjadi kenaikan PDRB maka akan menyebabkan permintaan tenaga kerja dari perusahaan atau produsen akan meningkat sehingga pengangguran akan menurun.
2. PMA bernilai positif dan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat terjadi karena penanaman modal asing yang dilakukan oleh negara maju akan cenderung memiliki faktor produksi yaitu padat modal agar produktivitasnya lebih tinggi dan efisien sehingga menghasilkan output yang lebih besar sehingga penanaman modal asing akan mengurangi penggunaan tenaga kerja.
3. PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. Penanaman modal dalam negeri memiliki peran penting dan bertanggung jawab atas pertumbuhan dan pembangunan perekonomian suatu negara. Ketika terdapat investor yang melakukan investasi maka akan sejumlah modal yang ditanamkan, atau ada pembelian barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya investasi dapat menyebabkan pengangguran menurun, karena ketika investasi naik maka akan banyak industri atau perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja dengan sistem padat karya.
4. PPSP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat. Kondisi ini mungkin terjadi karena pengeluaran pemerintah yang besar untuk sektor pendidikan belum berhasil menciptakan lapangan kerja baru yang cukup untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya,

hal ini bisa menyebabkan meningkatnya pengangguran intelektual di antara lulusan pendidikan yang tidak siap untuk bekerja secara profesional. Inilah yang menyebabkan pengeluaran anggaran di bidang pendidikan tidak memiliki dampak signifikan dalam mengurangi jumlah pengangguran.

5.2 Implikasi

1. Temuan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dalam penurunan pengangguran. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti industri jasa, teknologi, dan manufaktur, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja yang lebih kompeten. Dengan demikian, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di dalam sebuah perekonomian, serta memperbaiki kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran.
2. Temuan Penanaman Modal Asing tidak berpengaruh dalam penurunan pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memperhatikan dan mengkaji ulang kebijakan yang berkaitan dengan investasi asing serta merancang kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa investasi asing berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan investasi asing yang tinggi seharusnya dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam berproduksi dan mempekerjakan tenaga kerja, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi dan lebih selektif terhadap penerimaan investasi asing sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat pengangguran yang tidak hanya dengan membuka lapangan pekerjaan baru tetapi juga dengan alokasi untuk peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga lebih efektif diserap oleh berbagai sektor perekonomian.
3. Temuan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif terhadap penurunan pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah daerah maupun pihak terkait dapat meninjau kembali peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam negeri. Dengan meningkatnya penanaman modal dalam negeri mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dengan peningkatan kapasitas

produksi maupun pengembangan disektor padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

4. Temuan bahwa Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan tidak berdampak pada penurunan pengangguran. Oleh karena itu, menuntut pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan agar tercapainya keselarasan dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Seperti peningkatan kualitas pendidikan vokasional, yang berfokus pada keterampilan teknis yang dibutuhkan industri, karena hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa lulusan siap kerja dan memiliki keterampilan yang relevan mendapatkan pekerjaan yang sesuai sehingga mengurangi mismatch antara pendidikan dan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahman, E., Indriani. 2006. *Ekonomi*. Jakarta : Grafindo Media Pratama.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)*. In UMMagelang Conference Series (pp. 266-284).
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Astuti, R. D., & Gunawan, G. (2024). *Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 188–193. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art10>
- Boediono. (1982). *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2, Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Analisis Perkembangan Statistik. Ketenagakerjaan (Laporan Sosial Indonesia 2007)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2018-2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Barat (persen)*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2018-2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Barat (Persen)*.
- BPS Indonesia. (2022). Badan Pusat Statistik. Jakarta: BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2023). *Laporan Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat (triliun rupiah)*.
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim,A., Muzdalifah., Rahayu,D., (2022) *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kab/Kota dan 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019)*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(8)
- Hamid, E. S. (2018). *Perekonomian Indonesia*. Banten: Universitas Terbuka.
- Irawan dan M. Suparmoko. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE
- Islamia, N. A. (2017). *Analisis Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa tahun 2008-2016*. 1–110.
- Jhingan, M.L.. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Mankiw, N.Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi* Edisi Kelima. Terjemahan. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Mankiw. Gregory. 2007. *Teori Makro Ekonomi* ; Edisi ke 6. Jakarta : Erlangga
- Masri, S. dan Effendi S. 1995. *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Militina, T., & Rachma Utary, A. (2017). *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan*. 13(1), 50–60.
- Muana, Nanga. (2001). *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mulyono, A. 1997. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nugroho, A. W. (2022). *Pengaruh PDRB, Pembangunan Manusia, dan UMK terhadap Pengangguran Terbuka (Studi 21 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020)*. 1-120.
- Prihanto, Purwaka Hari. (2012). *Tren Dan Determinan Pengangguran Terdidik Di Provinsi Jambi*. Jurnal FEB Universitas Jambi: Jambi. 1 (5), 22-28.
- Rahmawati, F dan Vincent H. 2004. *Analisis Waktu Tunggu Tenaga Kerja Terdidik di Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2003*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
- Rahmawati, N. F. (2017). *Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Jumlah Pengangguran Terdidik di D.I Yogyakarta (tahun 2010-2015)*. 1-73.
- Rifai, A. (2018). *Analisis Pengaruh Investasi Asing, Investasi Dalam Negeri, Persentase Lulusan SMA/SMk, dan UMK terhadap Pengangguran Terdidik Kabupaten Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016*. 1-82.
- Saeffulloh, E., & Fitriana, R. (2017). *Pengaruh Inflasi, Pdb, Investasi Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1999-2015*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 91-100.
- Salim, A. A. (t.t.). *Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2020*.
- Sari, N.R.F. 2016. *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 14 No. 01 Juni 2016
- Sari Silaban, P. M., Permata Sari Br Sembiring, I., & Alvionita Br Sitepu, V. (t.t.). *Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019*.
- Septiana, V.A. (2019). *Determinan Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Pulau Jawa Tahun 2008-2017*. (Skripsi Sarjana Tidak Dipublikasikan). Universitas Jember

- Sriyana, J. 2015. *Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Ketiga ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta
- Wahyuni, L. (t.t.). *Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto Dan Investasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Provinsi Aceh*.
<http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomika>
- Wahid, A, & Bilal. (2012). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar Periode 1996-2011*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. UII Yogyakarta: Ekonisia.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Winarti, A. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Lampiran I . Data Penelitian

Kabupaten/ Kota	ID	Tahun	TPT (%)	PDRB (%)	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	PPSP (Rp)
KAB. BOGOR	1	2018	0,06	6,19	4954720331137	3733241000000	2455040344107
KAB. BOGOR	1	2019	0,05	5,85	4766165486960	4414689200000	2533558212726
KAB. BOGOR	1	2020	0,09	-1,76	2859502432029	6300894400000	2397666559495
KAB. BOGOR	1	2021	0,07	3,55	4643024772343	5253904200000	2445722037254
KAB. BOGOR	1	2022	0,05	5,25	1891370325550	6995185900000	2686946438649
KAB. SUKABUMI	2	2018	0,04	5,81	614292087285	351704700000	1235619886570
KAB. SUKABUMI	2	2019	0,03	5,64	367021534363	218169200000	1255216308110
KAB. SUKABUMI	2	2020	0,04	-0,91	211651265540	1490129400000	1121934363538
KAB. SUKABUMI	2	2021	0,04	3,74	48552300106	1973182500000	1194655057479
KAB. SUKABUMI	2	2022	0,04	5,12	1117445781766	521570900000	1245734629518
KAB. CIANJUR	3	2018	0,04	6,24	40985231297	143341100000	1429066165839
KAB. CIANJUR	3	2019	0,04	5,67	283177483191	704476400000	1293829453788
KAB. CIANJUR	3	2020	0,04	-0,77	85155875088	508728600000	1288977833166
KAB. CIANJUR	3	2021	0,04	3,48	22018258716	943701500000	1384829836281
KAB. CIANJUR	3	2022	0,03	5,04	739663462578	3098687200000	1349219670388
KAB. BANDUNG	4	2018	0,03	6,26	377413592730	2757558500000	1974281191336
KAB. BANDUNG	4	2019	0,04	6,36	3181456692471	2078077900000	2031755764631
KAB. BANDUNG	4	2020	0,05	-1,8	2849642855667	1096964700000	1912899513052
KAB. BANDUNG	4	2021	0,05	3,56	1155662698516	1237274100000	2017246334251
KAB. BANDUNG	4	2022	0,05	5,35	2642608884768	447291300000	2183605331350
KAB. GARUT	5	2018	0,04	4,96	170508276615	116482700000	1583786717431
KAB. GARUT	5	2019	0,03	5,02	150992983947	625115700000	1665608992008
KAB. GARUT	5	2020	0,04	-1,26	403758811857	322553700000	1568044769159
KAB. GARUT	5	2021	0,04	3,58	832634990440	457449000000	1547819255416
KAB. GARUT	5	2022	0,03	5,08	717949208751	189518600000	1585305215373
KAB. TASIKMALAYA	6	2018	0,04	5,7	73866160629	323483800000	1452420041282
KAB. TASIKMALAYA	6	2019	0,02	5,43	416577750000	232351650000	1557249292097
KAB. TASIKMALAYA	6	2020	0,03	-0,98	249631875000	141219500000	1612333619089
KAB. TASIKMALAYA	6	2021	0,03	3,43	136332187500	8599700000	1233405629927
KAB. TASIKMALAYA	6	2022	0,03	4,7	22034420823	15970700000	1135163150000
KAB. CIAMIS	7	2018	0,02	5,31	179559965	70000000	981251062345
KAB. CIAMIS	7	2019	0,03	5,38	131250000	162350000	1010261714419
KAB. CIAMIS	7	2020	0,03	-0,14	59040009	254700000	894235271221
KAB. CIAMIS	7	2021	0,03	3,66	109499971	3077500000	996624211197
KAB. CIAMIS	7	2022	0,03	5,02	15400413484	119304600000	997210029733
KAB. KUNINGAN	8	2018	0,06	6,43	68555735715	34738700000	1001250208020
KAB. KUNINGAN	8	2019	0,05	6,59	261000000	5006000000	1100316095614
KAB. KUNINGAN	8	2020	0,05	0,11	44140328935	1926000000	1190302702384
KAB. KUNINGAN	8	2021	0,05	3,56	202939924	7256400000	1087398894076
KAB. KUNINGAN	8	2022	0,05	5,53	90426556716	679680600000	1022212024170

KAB. CIREBON	9	2018	0,04	5,02	3841014452206	971675100000	1295250637912
KAB. CIREBON	9	2019	0,06	4,68	8943776242671	34588300000	1435421191374
KAB. CIREBON	9	2020	0,07	-1,08	4676737221361	278957800000	1299899965781
KAB. CIREBON	9	2021	0,05	2,47	4766583292005	93806900000	1322789961224
KAB. CIREBON	9	2022	0,04	4,09	2349547760286	1803641200000	1346228663652
KAB. MAJALENGKA	10	2018	0,03	6,48	1220680815162	4326832000000	431539158490
KAB. MAJALENGKA	10	2019	0,02	7,77	404791498930	637802200000	571802247555
KAB. MAJALENGKA	10	2020	0,03	0,89	198433508909	793739700000	967064390773
KAB. MAJALENGKA	10	2021	0,03	4,75	548614049053	650688400000	1014609469940
KAB. MAJALENGKA	10	2022	0,02	6,63	864520097077	2485589200000	929080339146
KAB. SUMEDANG	11	2018	0,04	5,79	107835153744	998334900000	1116765572470
KAB. SUMEDANG	11	2019	0,05	6,33	2833500211	1226609000000	1266576804466
KAB. SUMEDANG	11	2020	0,07	-1,12	37535050065	1142822900000	1147843141175
KAB. SUMEDANG	11	2021	0,06	3,17	79680950689	4169640000000	979367134150
KAB. SUMEDANG	11	2022	0,04	5,03	530113514481	1023491800000	1042777415404
KAB. INDRAMAYU	12	2018	0,04	1,34	115668782570	110867400000	1002428803592
KAB. INDRAMAYU	12	2019	0,04	3,2	1466513739784	33731600000	1082639061919
KAB. INDRAMAYU	12	2020	0,04	-1,58	189061993364	355297400000	995433290559
KAB. INDRAMAYU	12	2021	0,04	0,58	124518968463	1783530100000	984575963509
KAB. INDRAMAYU	12	2022	0,04	2,88	776675152221	1719866600000	990962164936
KAB. SUBANG	13	2018	0,04	4,41	1025243234345	519039800000	940265784557
KAB. SUBANG	13	2019	0,05	4,61	927455991278	1534884400000	1067100720535
KAB. SUBANG	13	2020	0,05	-1,15	4172205500779	78271300000	1051482551131
KAB. SUBANG	13	2021	0,05	2,18	2592201690611	2833960500000	1091866014763
KAB. SUBANG	13	2022	0,04	4,21	1307620923811	2633715600000	1126035345712
KAB. PURWAKARTA	14	2018	0,07	4,98	5828543447035	344236500000	691809037753
KAB. PURWAKARTA	14	2019	0,06	4,37	5236232759521	990512000000	744352147828
KAB. PURWAKARTA	14	2020	0,06	-2,13	3690863736520	3291093200000	728075885339
KAB. PURWAKARTA	14	2021	0,06	3,42	2198391771420	2531784000000	792592631769
KAB. PURWAKARTA	14	2022	0,05	5,24	5704059709449	8340734800000	665707381484
KAB. KARAWANG	15	2018	0,06	6,04	11635516208199	3199799800000	1269913336697
KAB. KARAWANG	15	2019	0,08	4,21	21324422160737	2972152400000	1387556812968
KAB. KARAWANG	15	2020	0,07	-3,8	14239563318049	2500160500000	1295574047567
KAB. KARAWANG	15	2021	0,08	5,85	18625324429368	8007088200000	1319831454795
KAB. KARAWANG	15	2022	0,06	6,31	28854401977375	17880344800000	1287070902650
KAB. BEKASI	16	2018	0,07	6,02	39056638848412	15000981300000	1611888564516
KAB. BEKASI	16	2019	0,07	3,95	27152530850601	20206857700000	1775381712895
KAB. BEKASI	16	2020	0,09	-3,39	25912458957938	11411416100000	1690913114402
KAB. BEKASI	16	2021	0,08	3,62	31485980177221	11777338500000	1893013514498
KAB. BEKASI	16	2022	0,10	5,3	29148981210629	704358400000	1989639274950
KAB. BANDUNG BARAT	17	2018	0,05	5,5	769875426334	43738100000	922457563805
KAB. BANDUNG BARAT	17	2019	0,04	5,05	4082571889299	41704500000	1024604488986
KAB. BANDUNG BARAT	17	2020	0,06	-2,41	2942579036773	174945700000	1018070621805
KAB. BANDUNG BARAT	17	2021	0,06	3,46	2625796493202	192648400000	975099937103
KAB. BANDUNG BARAT	17	2022	0,03	5,34	5593226067466	404638200000	767501585926

KAB. PANGANDARAN	18	2018	0,02	5,32	12059997675	15500000000	370294928738
KAB. PANGANDARAN	18	2019	0,03	5,94	100500014	13354850000	396914268712
KAB. PANGANDARAN	18	2020	0,02	-0,05	6800250000	11209700000	484922129422
KAB. PANGANDARAN	18	2021	0,02	3,67	8926125000	18942100000	373392823639
KAB. PANGANDARAN	18	2022	0,01	5,03	10573081457	1301954200000	423127942176
KOTA BOGOR	19	2018	0,07	6,14	272509075523	2830906300000	603889108561
KOTA BOGOR	19	2019	0,05	6,19	30437995410	2353142300000	587290101445
KOTA BOGOR	19	2020	0,09	-0,41	81819390165	1521396200000	535305560672
KOTA BOGOR	19	2021	0,08	3,76	258065207486	360406900000	629689933614
KOTA BOGOR	19	2022	0,08	5,65	269490171678	56409200000	722974203442
KOTA SUKABUMI	20	2018	0,07	5,52	929959961	46146750000	288475566283
KOTA SUKABUMI	20	2019	0,05	5,53	11105998397	35884300000	319197900523
KOTA SUKABUMI	20	2020	0,09	-1,49	3862081223	77707000000	277069362857
KOTA SUKABUMI	20	2021	0,08	3,71	319739856	197184200000	287215672165
KOTA SUKABUMI	20	2022	0,07	5,35	14296899572	3932863700000	276512079489
KOTA BANDUNG	21	2018	0,06	7,08	269059908221	2128593100000	1542949727280
KOTA BANDUNG	21	2019	0,06	6,79	3792603025661	2517682800000	1966258131886
KOTA BANDUNG	21	2020	0,09	-2,28	2001959226968	8623643400000	1432326806959
KOTA BANDUNG	21	2021	0,08	3,76	2489111180560	8957383500000	1801775489458
KOTA BANDUNG	21	2022	0,08	5,41	3855564520252	218467000000	1903172666772
KOTA CIREBON	22	2018	0,06	6,2	38868038275	523080500000	342386986713
KOTA CIREBON	22	2019	0,06	6,29	7711499219	2663200000	361537614548
KOTA CIREBON	22	2020	0,06	-0,98	10064161679	30731500000	371399248543
KOTA CIREBON	22	2021	0,07	3,05	7543819169	72586000000	363420329894
KOTA CIREBON	22	2022	0,05	5,1	573100330659	8934590600000	408986310770
KOTA BEKASI	23	2018	0,07	5,86	3697706518787	2674864900000	1499904543317
KOTA BEKASI	23	2019	0,07	5,41	3154301900991	4086281800000	1463151559286
KOTA BEKASI	23	2020	0,08	-2,58	2872652699709	3788747200000	1386733393927
KOTA BEKASI	23	2021	0,09	3,22	3029161733071	5137934300000	1518669260978
KOTA BEKASI	23	2022	0,07	4,96	4400172557830	3250560400000	1659374888104
KOTA DEPOK	24	2018	0,06	6,97	462971300925	1264321800000	845861958612
KOTA DEPOK	24	2019	0,04	6,74	1694923580781	4470034900000	887941266374
KOTA DEPOK	24	2020	0,08	-1,92	712444573552	7175435000000	822582707899
KOTA DEPOK	24	2021	0,08	3,76	287110453452	3228806300000	820872881981
KOTA DEPOK	24	2022	0,07	5,24	764639774871	444512500000	878654755661
KOTA CIMAHI	25	2018	0,05	6,46	29516179030	144719500000	368442838488
KOTA CIMAHI	25	2019	0,06	7,85	1234288309385	91878800000	375118189512
KOTA CIMAHI	25	2020	0,10	-2,26	829546833817	261506800000	319813872257
KOTA CIMAHI	25	2021	0,10	4,19	357264808191	48317500000	508669345451
KOTA CIMAHI	25	2022	0,07	5,92	1515114895566	127438200000	373653106870
KOTA TASIKMALAYA	26	2018	0,04	5,93	489629625000	43585300000	532046175081
KOTA TASIKMALAYA	26	2019	0,04	5,97	3861000000	2219600000	536452913838
KOTA TASIKMALAYA	26	2020	0,04	-2,01	3706561025	15401100000	485210166136
KOTA TASIKMALAYA	26	2021	0,04	3,57	404419836	952800000	519325497095
KOTA TASIKMALAYA	26	2022	0,05	5,01	365924852	29562400000	539265790438
KOTA BANJAR	27	2018	0,03	5,05	399000000	15257600000	176169582713
KOTA BANJAR	27	2019	0,04	5,03	390750000	10324700000	184264842039
KOTA BANJAR	27	2020	0,04	0,94	394875000	5391800000	173389250325
KOTA BANJAR	27	2021	0,04	3,49	199687500	1086900000	178574095100
KOTA BANJAR	27	2022	0,04	4,19	4304999	3239350000	180162993086

Lampiran II . Hasil Estimasi FEM

Dependent Variable: TPT_TERDIDIK _____

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/24 Time: 12:17

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.025406	0.217388	0.116869	0.9072
PDRB_GROWTH__	-0.001853	0.000273	-6.784490	0.0000
LOGPMA	0.000319	0.000612	0.521534	0.6031
LOGPMDN	-0.000790	0.000588	-1.342281	0.1824
LOGPPSP	0.001668	0.007819	0.213389	0.8314

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.842353	Mean dependent var	0.051858
Adjusted R-squared	0.796878	S.D. dependent var	0.019211
S.E. of regression	0.008658	Akaike info criterion	-6.462216
Sum squared resid	0.007797	Schwarz criterion	-5.795079
Log likelihood	467.1996	Hannan-Quinn criter.	-6.191110
F-statistic	18.52339	Durbin-Watson stat	2.142351
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran III. Hasil Estimasi CEM

Dependent Variable: TPT_TERDIDIK _____
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/01/24 Time: 12:16
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.189437	0.071294	2.657114	0.0089
PDRB_GROWTH__	-0.001732	0.000509	-3.402382	0.0009
LOGPMA	0.002155	0.000701	3.075568	0.0026
LOGPMDN	0.001509	0.000815	1.851335	0.0664
LOGPPSP	-0.008255	0.002840	-2.906338	0.0043
R-squared	0.270386	Mean dependent var		0.051858
Adjusted R-squared	0.247937	S.D. dependent var		0.019211
S.E. of regression	0.016660	Akaike info criterion		-5.315244
Sum squared resid	0.036083	Schwarz criterion		-5.207642
Log likelihood	363.7790	Hannan-Quinn criter.		-5.271518
F-statistic	12.04412	Durbin-Watson stat		0.612037
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran IV. Hasil Estimasi REM

Dependent Variable: TPT_TERDIDIK_____
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/01/24 Time: 12:18
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 135
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.044346	0.110141	0.402626	0.6879
PDRB_GROWTH__	-0.001853	0.000272	-6.815522	0.0000
LOGPMA	0.000905	0.000564	1.603032	0.1114
LOGPMDN	-0.000381	0.000559	-0.681007	0.4971
LOGPPSP	3.30E-05	0.004109	0.008033	0.9936
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.014186	0.7286
Idiosyncratic random			0.008658	0.2714
Weighted Statistics				
R-squared	0.260485	Mean dependent var		0.013655
Adjusted R-squared	0.237731	S.D. dependent var		0.010234
S.E. of regression	0.008935	Sum squared resid		0.010379
F-statistic	11.44774	Durbin-Watson stat		1.667017
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.132663	Mean dependent var		0.051858
Sum squared resid	0.042895	Durbin-Watson stat		0.403351

Lampiran V. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.512593	(26,104)	0.0000
Cross-section Chi-square	206.841177	26	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TPT_TERDIDIK_____

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/24 Time: 12:23

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.189437	0.071294	2.657114	0.0089
PDRB_GROWTH__	-0.001732	0.000509	-3.402382	0.0009
LOGPMA	0.002155	0.000701	3.075568	0.0026
LOGPMDN	0.001509	0.000815	1.851335	0.0664
LOGPPSP	-0.008255	0.002840	-2.906338	0.0043
R-squared	0.270386	Mean dependent var		0.051858
Adjusted R-squared	0.247937	S.D. dependent var		0.019211
S.E. of regression	0.016660	Akaike info criterion		-5.315244
Sum squared resid	0.036083	Schwarz criterion		-5.207642
Log likelihood	363.7790	Hannan-Quinn criter.		-5.271518
F-statistic	12.04412	Durbin-Watson stat		0.612037
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran VI. Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.445694	4	0.0143

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB GROWTH	-0.001853	-0.001853	0.000000	0.9998
LOGPMA	0.000319	0.000905	0.000000	0.0138
LOGPMDN	-0.000790	-0.000381	0.000000	0.0262
LOGPPSP	0.001668	0.000033	0.000044	0.8058

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TPT_TERDIDIK_____

Method: Panel Least Squares

Date: 10/01/24 Time: 12:27

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.025406	0.217388	0.116869	0.9072
PDRB GROWTH	-0.001853	0.000273	-6.784490	0.0000
LOGPMA	0.000319	0.000612	0.521534	0.6031
LOGPMDN	-0.000790	0.000588	-1.342281	0.1824
LOGPPSP	0.001668	0.007819	0.213389	0.8314

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.842353	Mean dependent var	0.051858
Adjusted R-squared	0.796878	S.D. dependent var	0.019211
S.E. of regression	0.008658	Akaike info criterion	-6.462216
Sum squared resid	0.007797	Schwarz criterion	-5.795079
Log likelihood	467.1996	Hannan-Quinn criter.	-6.191110
F-statistic	18.52339	Durbin-Watson stat	2.142351
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran VII. Uji Lagrange Multiplier Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	106.5357 (0.0000)	0.176153 (0.6747)	106.7119 (0.0000)
Honda	10.32161 (0.0000)	-0.419706 (0.6626)	7.001707 (0.0000)
King-Wu	10.32161 (0.0000)	-0.419706 (0.6626)	3.378196 (0.0004)
Standardized Honda	11.06371 (0.0000)	0.205580 (0.4186)	4.236928 (0.0000)
Standardized King-Wu	11.06371 (0.0000)	0.205580 (0.4186)	1.316573 (0.0940)
Gourieroux, et al.	--	--	106.5357 (0.0000)